

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN KEBUMEN
(studi kasus : listrik pedesaan th 1985-2003)

SKRIPSI



Oleh:

Nama : Ferrani Purdiyanto
Nomor Mahasiswa : 98.313.031
Jurusan : Ekonomi pembangunan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN KEBUMEN
(studi kasus : listrik pedesaan th 1985-2003)**

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar sarjana jenjang strata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Ferrani Purdiyanto
Nomor Mahasiswa : 98.313.031
Jurusan : Ekonomi pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi progam Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 21 april 2006

Penulis,



Ferrani purdiyanto

PENGESAHAN

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN KEBUMEN

(studi kasus : listrik pedesaan th 1985-2003)

Nama : Ferrani Purdiyanto
Nomor Mahasiswa : 98.313.031
Jurusan : Ekonomi pembangunan

Yogyakarta, 21 april 2006
telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,



Drs. Sahabudin Sidiq , MA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten
Kebumen (Studi Kasus Listrik Pedesaan Th 1985 - 2003)**

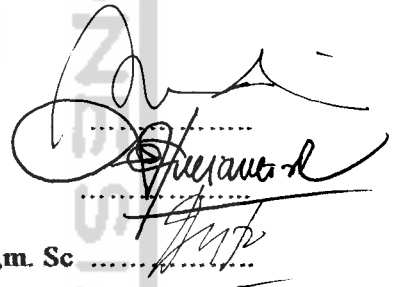
Disusun Oleh: FERRANI PURDIYANTO
Nomor mahasiswa: 98313031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal: 16 Mei 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Sahabudin Sidiq, MA

Penguji I : Drs. Nur Feriyanto, M.Si

Penguji II : Drs. Moh. Bakti Hendri Anto, m. Sc



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmadi Ishak, M.Bus, Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr,Wb

Puji sukur penulis pnjatkan pada Allah Swt karena atas Rahmt dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Progam Strata I pada Fakultas Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen adalah merupakan penerimaan pajak daerah tertinggi di Kebumen, sehingga menarik minat untuk mengetahui apa yang membuat pajak penerangan jalan tertinggi pendapatannya.

Untuk suamiku Ichwan saya ucapkan banyak terima kasih atas segala pengertian , pengorbanan dan dukungannya. Untuk keluarga besarku papa, mama, de' rendhi, de' nina dan semua eyangku terima kasih atas segala bantuan dan doanya . Untuk dosen pembimbingku Drs Sahabudin sidiq,MA dan Haryono pegawai pemda terimakasih atas kesabarannya dalam membimbing dan segala bantuannya.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Yogyakarta, 21 April 2006

Penulis

Ferrani p

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar Isi	vi
Halaman Daftar Tabel	viii
Halaman Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	9
2.1 Letak batasan dan Keadaan Wilayah	9
2.2 Pemerintahan	11
2.3 Keadaan Penduduk	12
2.4 Tarif Biaya beban listrik	13
2.5 Jumlah Pelanggan listrik	14
2.6 Panjang Jalan	14
2.7 Perekonomian Kabupaten Kebumen	15
2.8 Penerimaan Pajak penerangan Jalan	16
BAB III KAJIAN PUSTAKA	22
BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA	24
4.1 Pajak Daerah	24
4.2 Peraturan Daerah tentang Pajak	27
4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak	28

4.4 Identifikasi semua Variabel Penelitian	32
4.5 Kesimpulan yang Diperoleh dari Diskusi	36
4.6 Hipotesa Penelitian	38
 BAB V METODE PENELITIAN	39
5.1 Daerah Penelitian	39
 BAB VI ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN.....	48
6.1 Uji Statistik	49
6.2 Uji Asumsi Klasik	53
6.3 Koefisien Regresi	56
6.4 Interpretasi Ekonomi	57
 BAB VII KESIMPULAN DAN ANALISA	61
7.1 Kesimpulan	61
7.2 Saran	62



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Pengguna luas lahan sawah dan kering.....	10
2.2 Keadaan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen.....	13
4.1 Hasil uji regresi berganda.....	49
4.2 Hasil uji heterokedastisitas.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan sarana dan prasarana serta berjalannya roda pemerintahan di suatu Kabupaten adalah pajak daerah. Di sesuai dengan Undang-undang No.18 tahun 1997 pasal angka 6, bahwa yang disebut pajak daerah selanjutnya disebut. Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang yang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Peranan dari pemerintah daerah dalam proses penigkatan pendapatan daerahnya, supaya pembiayaan daerahnya untuk lebih mandiri akan dapat tercapai. Sehingga pajak daerah menjadi sangatlah penting peranannya. Pembangunan adalah usaha-usaha menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang ada, untuk meningkatkan taraf hidup manusia oleh karena potensi-potensi. Hal ini diperlukan agar proses pemungutan atau administrasi atau penetapan tariff, terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut tidak menyalahi kewenangan pemerintah daerah.

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan, perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan. Ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain harus ditetapkan

dengan Undang-undang. pajak daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia. Yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil, sejalan dengan sistem perpajakan nasional. Pembinaan pajak daerah dilakukan secara terpadu dengan pajak nasional, pembinaan ini dilakukan secara terus menerus terutama mengenai objek dan tarif pajak. Sehingga antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi. Peraturan daerah pada dasarnya disesuaikan dengan pajak Nasional, jenis pajak Kabupaten / Kota dengan tarif pajak sebagaimana pajak dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi :

- a. Pajak hotel 10% (sepuluh persen)
- b. Pajak restoran 10% (sepuluh persen)
- c. Pajak hiburan 35% (tiga puluh lima persen)
- d. Pajak reklame 25% (dua puluh lima persen)
- e. Pajak penerangan jalan 10% (sepuluh persen)
- f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C 20% (dua puluh persen)

Guna memberikan perlindungan kepada masyarakat pengenaan tarif pajak. Perlunya diadakan tarif pajak maksimal oleh pemerintah pusat sehingga, masyarakat tidak terlalu terbebani dengan tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerahnya. Untuk pembebanan tarif pajak minimal tidak ada karena diberikan tanggung jawab kepada tiap pemerintah daerah, untuk penetapan tarif pajak yang akan disesuaikan. Dengan pendapatan pajak daerah yang diperolehnya dan memberikan tanggung jawab, kepada pembayar pajak supaya

membiasakan membayar pajaknya. Sesuai dengan kemampuan yang ada, tanpa ada paksaan walaupun pada masyarakat tidak mampu untuk membiasakannya. Walaupun demikian dengan kebijakan dari pemerintah tetap diadakan klasifikasi tariff, yang berdasarkan masing-masing kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objeknya. Disamping itu dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan klasifikasi tarif, berdasarkan kemampuan wajib pajak atau berdasarkan jenis objeknya.

Untuk peraturan tarif pajak daerah di Kabupaten Kebumen dengan undang-undangnya, sudah sesuai dengan tarif pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beban yang adil belum berjalan dengan baik dan masih banyak para wajib pajak, yang belum sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak . Seperti halnya tukang parkir, yang harus membayar pajak 20% dari penghasilannya. Karena pendapatan sangat minim dan hanya pas, untuk kebutuhan hidupnya. Pihak pemerintah imbal baliknya belum terlalu nyata, apa dikarenakan proses imbal balik dari pemerintah tidak wajib. Sehingga pemerintah mempergunakan pendapatan pajaknya samau dia sendiri, sehingga realisasi untuk masyarakatnya dianggap masih kurang. pengeluaran pemerintah juga merupakan faktor yang mempengaruhi pajak penerangan jalan.

Teori Development from Below berpendapat: bahwa “Orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah dari pada pemerintah pusat, karena mereka dapat melihat manfaat dalam kemudahan dan pembangunan di daerah mereka” (Devey, 1988). Politis diperlukan dalam menentukan pajak, menetapkan struktur tariff, memutuskan siapa yang harus membayar, atau

bagaimana pajak ditetapkan. Memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar (Kesit,2003,19).

Pendapatan suatu pajak dalam mempertanggungjawabkannya ada hambatan dengan adanya kepekaan politik. Apabila akan berpolitik mereka menggunakan tarif pajak, sebagai alat penarik minat para masyarakat. Mereka akan enggan untuk menaikkan tariff pajak, sehingga akan mencari jalan lain untuk meningkatkan pendapatan daerahnya. Kalau perlu untuk kenaikan popularitas diperlukan, maka akan menurunkan tarif pajaknya.

Dikota yang kecil penggunaan tenaga listrik ternyata sangat besar, itu ditunjukkan dengan pendapatan pajak penerangan jalannya. Pajak penerangan jalan diperoleh dari 9% dari penggunaan tenaga listrik para masyarakat di Kabupaten Kebumen, dengan kata lain 9% dikali nilai jual tenaga listrik(Perda,1998.4). Nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWH, yang ditetapkan dalam rekening listrik. Khusus untuk kegiatan industri, penambahan minyak bumi dan gas alam, Nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen). Peraturan daerah untuk tarif pajak penerangan jalan, masih dibawah peraturan pemerintah pusat yaitu sebesar 10%. Penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen cukup tinggi dan paling tinggi, yang sesuai dengan yang ada pada pendapatan daerah, di bandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang lain. Setiap tahunnya penerimaannya selalu meningkat, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen. kebutuhan tenagalistriknya berbeda/bertambah tiap masyarakatnya, dengan begitu pendapatan pajak penerangan jalan pun meningkat. Rekening penerangan jalannya

yang membayar pemerintah daerah, tapi tetap bebannya diberikan kepada tiap pemakai tenaga listrik. Penerimaan pajak penerangan jalan tidak habis untuk membayar nilai jual tenaga listrik penerangan jalan, tetapi sebagian lagi digunakan untuk pengeluaran pembangunan pemerintah daerah. Walaupun nilai jual tenaga listrik selalu meningkat, masyarakat tidak banyak yang mau berhemat penggunaan akan tenaga listrik. Pendapatan pajaknya pun tetap tinggi . Hanya saja apakah peranan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen sudah sesuai, atau sudah berpengaruh. Untuk melihat peranannya perlu faktor-faktor untuk menganalisisnya yaitu :

- a. PDRB Perkapita Kabupaten Kebumen (PDRB)
- b. Tarif biaya beban (TBB)
- c. Jumlah pelanggan listrik (JPL)
- d. Panjang jalan (PJ)

1.2 Rumusan Masalah

Mengetahui pokok permasalahan merupakan suatu langkah yang harus dilakukan, untuk memecahkan suatu masalah. Karena itu sangat penting artinya sebagai landasan dalam menyikapi permasalahan tersebut dimasa yang akan datang, baik untuk mengantisipasi ataupun untuk mengendalikan. Berpijak dari latar belakang dan permasalahan, dan pentingnya pengamatan terhadap perpajakan penerangan jalan di Kabupaten Kebumen, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor PDRB perkapita Kabupaten Kebumen, Tarif biaya beban, Jumlah pelanggan listrik, dan Panjang jalan(variable independen) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen(variable dependent).
2. Seberapa besar peningkatan faktor-faktor PDRB perkapita,Tarif biaya beban, Jumlah pelanggan listrik,dan Panjang jalan (variabel independent) berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen (Variabel Dependent).

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pengaruh faktor-faktor variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Untuk menganalisa seberapa besar saling berpengaruh antara variable independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Manfaat dari penelitian:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi, bahwa penerimaan pajak penerangan jalan. Dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, atau untuk kepentingan masyarakat.
2. Sesuai dengan hasil yang didapat, bagi masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan. Kepercayaan masyarakat dengan pemerintah dengan Realisasi penerimaan pajak penerangan jalan transparan, sehingga masyarakat dapat menilai kerja pemerintah dengan baik.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum Kabupaten Kebumen

Bab ini akan menguraikan tentang gambaran umum kabupaten kebumen dan perkembangan pajak penerangan jalannya.

BAB III : Kajian Pustaka

Bab ini akan menguraikan tentang Penelitian tentang pendapatan pemerintah yang telah diteliti sebelumnya di daerah Kabupaten Kebumen

BAB IV : Landasan Teori

Bab ini menguraikan hasil tentang teori yang berhubungan dengan variable yang dibahas.

BAB V : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan alat-alat yang digunakan untuk melakukan penelitian.

BAB VI : Analisa dan Pembahasan

Bab ini menguraikan hasil olah data time series yang digunakan dalam penelitian ini, serta dengan penyertaan kesalahan asumsi klasik.

BAB VII :Simpulan dan Implikasi

Bab ini memberikan kesimpulan-kesimpulan dari hal penelitian khususnya hal yang terdapat dalam analisa data.



BAB II

Gambaran Umum Daerah Penelitian

2.1 Letak Batasan dan Keadaan Wilayah

Kabupaten kebumen yang merupakan salah satu bagian dari propinsi Jawa Tengah yang terletak $7^{\circ}27'-7^{\circ}50'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}22'-109^{\circ}50'$ Bujur Timur. Kondisi geografis merupakan dasar dari penataan lingkungan. Lingkungan hidup yang merupakan bagian ekosistem berfungsi sebagai penyangga kehidupan makhluk bumi. Sumberdaya alam yang ada diarahkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Dengan batasan wilayah :

Sebelah Barat	= Kab. Cilacap
	= Kab. Banyumas
Sebelah Timur	= Kab. Purworejo
Sebelah Utara	= Kab. Wonosobo
	= Kab. Banjarnegara
Sebelah Selatan	= Samudra Indonesia

Dengan luas wilayah 18.111,50 Ha atau 1.281.115 Km² dengan kondisi wilayah sebagian merupakan daerah pantai , sebagian merupakan dataran rendah dan sebagian lagi merupakan dataran tinggi/pegunungan . Di wilayah ini tersimpan deposit sumber daya alam yang cukup banyak, kebanyakan masyarakat hanya bisa mengambil tapi tak bisa melestarikannya . Dari luas wilayah tersebut 39.632,00 Ha (30,94%) merupakan tanah sawah dan tanah kering seluas 88.386,50 Ha (69,09%). Dengan penggunaan luas tanah dengan melihat data dibawah ini:

Tabel II.1:
Penggunaan luas lahan sawah dan kering
di Kabupaten Kebumen Tahun 2003

Penggunaan	Luas	Prosentase
Sawah		
- Tanah sawah dengan irigasi teknis	18.056 Ha	45,56%
- Tanah sawah dengan tadah hujan	13.005 Ha	32,81%
- Tanah sawah dengan irigasi ½ sederhana	8.571 Ha	21,63%
		100%
Lahan kering		
- Bangunan dan pekarangan	36.421 Ha	41,16%
- Tegal/kebun	29.097 Ha	32,89%
- Hutan negara	16.861 Ha	19,06%
- Lain-lainnya		6,89%

Sumber: BPS Kebumen

Kondisi musim hujan dan musim kemarau masih berjalan hanya saja pengaruh dari angin laut cukup terasa. Selama tahun 2003 tercatat hari hujan sebanyak 97 hari, dengan curah hujan 2.864mm. Bulan agustus merupakan bulan terdingin dengan suhu udara sekitar 15,30° C tercatat distasiun pencatat Prembun dan 20,60°C tercatat distasiun pencatat Sempor .Jarak ibu kota kabupaten ke kecamatan terjauh adalah ibu kota (kebumen) ke kecamatan Ayah ± 45,50 Km, sedangkan sarana angkutan yang sudah terjangkau semua kecamatan berupa sarana angkutan umum pedesaan.

2.2 Pemerintahan

Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan dan 460 desa/kelurahan dimana untuk pemerintahan terkecil terdiri dari 11 kelurahan dan 449 desa. Pada tahun 2003 jumlah rukun warga (RW) sebanyak 1.917 RW dan dibagi menjadi 6.850RT. Kecamatan yang membawahi desa terbanyak yaitu kecamatan Ambal dengan jumlah desa sebanyak 32 desa dan kecamatan Kebumen dengan 29 desa/kelurahan . Sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya adalah Kecamatan Sadang hanya 7 desa, akan tetapi kecamatan ini merupakan daerah tersulit dikabupaten ini.

2.3 Keadaan penduduk

Berdasarkan data [kebumen dalam angka 2003] yang tercantum dalam BPS Kab Kebumen pada tahun 2003 penduduk Kab Kebumen berjumlah 1.193.978 yang terdiri dari 603.022 jiwa laki-laki dan 590.956 jiwa perempuan sehingga sex rasionya sebesar 102, sedangkan distribusi/persebaran penduduk tiap kecamatan hampir merata. Dari jumlah tersebut yang dibawah 15 tahun sekitar 30,45% atau 363.591 jiwa dan penduduk usia 65 tahun keatas berjumlah 91.175 jiwa (7,64%), sedangkan penduduk usia 15-65 tahun sebanyak 739.212 jiwa (61,91%). Mengalami pertumbuhan sebesar 0,86% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 288.852 rumah tangga sehingga rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Densitas penduduk Kabupaten Kebumen sebesar 932 jiwa/Km², dimana Kecamatan Kebumen terpadat penduduknya dan Kecamatan Sadang terjarang penduduknya.

Ditinjau dari keadaan tenaga kerja (penduduk 10 tahun keatas) yang berjumlah 962.766 jiwa dapat digambarkan angkatan kerja sebesar 67,48% dan bukan angkatan kerja sebesar 32,52%. Persentase keadaan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel III.2

Tabel III.2:
Keadaan tenaga kerja di Kabupaten Kebumen
Tahun 2003

Angkatan Kerja	Prosentase
Bekerja	
- Pertanian	52,85%
- Jasa-jasa	19,31%
- Restoran, hotel, perdagangan	9,63%
- Industri, konstruksi, dll	12,70%
Mencari kerja	5,51%

Sumber : BPS Kebumen

2.4 Tarif biaya beban listrik.

Pada dasarnya penentuan tarif biaya beban listrik ada pada pusat . Ada berbagai faktor yang berpengaruh, dalam penentuan tarif biaya beban listrik. Salah satunya peraturan dari pemerintah pusat , yang akan diikuti oleh pemerintah daerah, disesuaikan dengan kebutuhan tiap daerahnya . Penentu lainnya ada pada kesadaran masyarakat dalam penggunaan listrik , apabila penggunaan listriknya terlalu boros akan berpengaruh juga pada biaya yang harus dikeluarkan , atau bahkan akan

ada pemadaman sesaat karena beban yang terlalu tinggi ,seperti halnya yang terjadi dijakarta. Apabila pemakaian tenaga listrik ada kesadaran dari masyarakat secara otomatis biayanya akan rendah dan bisa juga tariffnya turun , karena ada keuntungan untuk PLN.

2.5 Jumlah pelanggan listrik .

Tiap tahunnya pelanggan listrik selalu meningkat , walaupun terkadang banyak juga pelangan yang tidak membayar tagihan selama beberapa bulan akan dicabut. Apabila pelanggan yang sudah dicabut meteran listriknya dan tidak ditebus lagi selama 6 bulan, maka akan dialihkan ke pelanggan baru. Tiap tahunnya jumlah calon pelanggan selalu meningkat, seperti halnya pada tahun 1998 jumlah pelanggan listrik sebesar 126.886 ribu dan untuk tahun 2003 sebesar 168 .422 ribu pelanggan.

2.6 Panjang jalan

Untuk mengetahui berapa biaya yang dikeluarkan untuk membayar penerangan jalan ke PT. PLN , akan diketahui dengan melihat berapa panjang jalan yang mendapat penerangan jalan . Penerangan jalan di Kabupaten Kebumen cukup terang dengan banyaknya lampu penerangan

jalan nya. Terkadang tanpa ijin dari pemerintahpun masyarakat membuat lampu penerangan jalan sendiri.

2.7 Perekonomian Kabupaten Kebumen.

Kondisi perekonomian Kabupaten Kebumen pada tahun 2003 secara agregat mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan 1993 selama empat tahun terakhir. Upaya pemulihan ekonomi secara perlahan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan namun masih dibawah pertumbuhan ekonomi sebelum krisis ekonomi (tahun 1995 sebesar 5,55% dan tahun 1996 sebesar 5,19%). Kabupaten Kebumen sebagai salah satu daerah agraris di Jawa Tengah dengan hampir 43,08 persen kontribusi PDRB berasal dari sektor pertanian pada tahun 2003 menunjukkan peningkatan pada kinerja ekonominya. Pada tahun 2003 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen atas dasar harga konstan 1993 sebesar 3,77 persen. Pertumbuhan sebesar itu disebabkan seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dibanding tahun 2002. Namun demikian, beberapa sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air serta sektor bangunan/konstruksi laju pertumbuhannya lebih rendah dibanding tahun 2002.

Angka inflasi merupakan salah satu indikator prekonomian, yang menunjukkan stabilitas ekonomi suatu wilayah untuk menggambarakan tingkat perubahan harga . Laju inflasi biasanya disebabkan oleh turunnya produksi barang dan jasa, distribusi dan perubahan harga/tarifnya yang ditentukan oleh pemerintah seperti harga BBM(Bahan Bakar Minyak), perubahan tarif listrik, tarif PAM, telepon dan sebagainya. Tingkat inflasi yang tinggi akan merugikan perekonomian suatu wilayah , yang dampaknya dapat dirasakan rakyat berpenghasilan rendah. Pada sisi lain, tingkat harga yang tinggi akan kalah bersaing pada era globalisasi/pasar bebas.

Pemulihan ekonomi yang dimulai tahun 1999 dilakukan dengan beberapa kebijakan diantaranya adalah pengurangan/penghapusan subsidi. Dampak dari kebijakan tersebut adalah masyarakat harus menanggung beban dengan menerima kenyataan naiknya beberapa tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya pada tahun 2000 inflasi mulai terlihat merambat naik di Kota Kebumen tercatat sebesar 8,74 persen jauh lebih tinggi dari inflasi tahun 1999 yang tercatat sebesar 2,55 persen. Beberapa hal yang menyebabkan kenaikan tersebut antara lain naiknya harga BBM serta penyesuaian gaji pegawai yang berdampak pada penyesuaian tarif utamanya sektor transportasi.

2.8 Penerimaan pajak penerangan jalan

Pajak yang dihasilkan untuk pajak daerah salah satunya adalah dari pajak penerangan jalan yang diperoleh dari 9% pembayaran rekening listrik. Tahun 2000 pajak penerangan jalan sebesar Rp 4,7M dari perolehan pajak daerah sebesar Rp 6,5M. Menunjukkan pemakaian akan tenaga listrik cukup besar. Penggunaannya sebagian untuk keperluan pemerintah dan sebagian lagi untuk imbal balik ke masyarakat. Dalam bentuk bantuan biaya untuk berbagai faktor seperti halnya pada:

2.8.1. Sosial

Pendidikan merupakan kelompok sosial dasar, kondisinya di Kabupaten Kebumen sudah cukup baik hanya saja perlu ditingkatkan. Pendidikan formal dan pendidikan non formal (lewat keagamaan) tergambar dalam publikasi ini. Kondisi pendidikan untuk Kabupaten Kebumen termasuk pada taraf yang bagus untuk fasilitas pendidikan itu sendiri jumlah tempat pendidikan di Kabupaten Kebumen ada sekitar 1.772 sekolah baik yang negeri atau yang swasta, dari Tk sampai perguruan tinggi. Untuk fasilitas di bidang kesehatan jumlah rumah sakitnya ada 8 buah, hanya saja 1 rumah sakit di Kutowinangun masih berstatus Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB). Sarana kesehatan lain yaitu Puskesmas dibagi menjadi : Puskesmas

perawatan sebanyak 3 buah, Puskesmas non perawatan sebanyak 32 buah dan Puskesmas pembantu sebanyak 72 buah. Untuk fasilitas keagamaan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Kebumen beragama Islam (98,78%) disamping ada pemeluk agama lain. jumlah tempat ibadah di Kabupaten Kebumen sebanyak 4.893 buah. Panti asuhan yang ada di Kabupaten Kebumen sebanyak 12 buah dengan penghuni sebanyak 318 orang, Panti Karya sebanyak 1 buah dengan penghuni sebanyak 50 orang.

2.8.2 Pertanian

Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian daerah mengingat bahwa kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kebumen mencapai 43,93%. Sebagian besar angkatan kerja bekerja di sektor pertanian. Barang yang terproduksi dalam sektor pertanian selain padi ada juga yang lain seperti halnya jagung, ketela pohon, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Dari kesemua hasil pertanian dibandingkan tahun sebelumnya terdapat kenaikan rata-rata sebesar 4,20%. Begitu juga dengan hasil pertanian yang lainnya seperti sayuran, buah, kelapa, dan cengkeh juga terdapat dalam Kabupaten Kebumen. Populasi ternak besar dan kecil di kabupaten Kebumen boleh dikatakan

stabil hanya populasi domba yang naik cukup besar yaitu 29,65% dibanding tahun 2002 dimana pada tahun 2002 populasi domba sebanyak 27.991 ekor menjadi 36.289 ekor pada tahun 2003. Dari Kabupaten Kebumen sebenarnya terkenal sebagai penghasil sarang burung walet yang dulunya diambil dari goa yang berada dipinggiran pantai ,kalau sekarang sudah mulai di ternak. Dan adalagi penghasilan dari masyarakat kebumen yaitu berupa pembuatan genteng Sokka.

2.8.3 Industri, Listrik dan Air Minum

Berdasarkan klasifikasi di Kabupaten Kebumen terdapat 13 perusahaan Industri Menengah dengan rincian 5 perusahaan bergerak pada kelompok Industri Barang Galian Bukan Logam kecuali Minyak bumi dan batu bara, 3 perusahaan Industri Kayu dan barang dari kayu, Perusahaan Industri Makanan , Minuman dan Tembakau. Untuk Industri Kecil ada 1.185 perusahaan, Industri Kerajinan rumah tangga berjumlah 35.157 dan jumlah tenaga yang diserap dalam sektor Industri berjumlah 88.616 orang. Banyaknya pelanggan listrik PLN tiap tahunnya selalu meningkat tapi untuk kuota pemakaiannya belum tentu meningkat yang dalam bentuk KWh dikarenakan pemakaian tenaga listrik disesuaikan pada tingkat ekonomi , kondisi

perekonomian suatu wilayahnya dan juga kebutuhan akan tenaga listrik itu sendiri. Walaupun di daerah ada pembangkit listrik tenaga air yang berada di Waduk Wadaslintang di Kecamatan Prembun. Tapi tetap saja tarif listrik ditentukan dari pusat tidak berpengaruh terhadap biaya beban listriknya. Dari sektor Air Minum jumlah pelanggan PDAM pada tahun 2003 sebanyak 15.446 pelanggan .PDAM masuk di Kabupaten Kebumen pada tahun 1990 itupun hanya disekitar perkotaan saja dan masuk di pedesaan pada tahun 2000 peminatnya jarang karena di pedesaan sumber airnya jernih, jika ada yang tidak jernih atau kering juga jarang karena perekonomiannya masih dibawah rata-rata ,buat makan aja susah apalagi buat bayar air lebih aik nunggu hujan . Sehingga sebagai pemerintah harus menyediakan air bersih dan untuk menyirami taman dan sawah.

2.8.4 Pariwisata Dan Perhubungan

Panjang jalan di Kabupaten Kebumen ada 610,20 Km, jumlah kendaraan angkutan umum yang ada pada tahun 2003 sebanyak 3.950 buah dan kendaraan non angkutan ada sebanyak 78.385 buah. Fasilitas akomodasi yang terdiri dari hotel, losmen, dan penginapan ada 25 buah dan obyek wisata yang sudah dikembangkan sampai tahun 2003 sebanyak 10 obyek wisata.

Tempat pariwisata kebanyakan adalah pantai karena pembatas untuk Kebumen sendiri adalah Samudra Indonesia dan pegunungan karena banyaknya daerah pegunungan , bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia seperti taman mini atau taman hiburan yang lain. Atau bahkan untuk daerah Kecamatan Gombong yang terkenal malah sesuatu yang sangat negatif , tapi ada pasar yang luasnya melebihi pasar terbesar di Jawa Tengah sendiri.

2.8.5

Koperasi

Gambaran perkoperasian hanya mencakup jumlah koperasi KUD berjumlah 23 buah pada tahun 2003 dengan jumlah anggota sebanyak 116.494 orang dan jumlah pegawai sebanyak 174 orang dan non KUD berjumlah 330 buah dengan jumlah anggota sebanyak 19.365 orang dan jumlah pegawai sebanyak 170 orang.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Pengambilan panduan skripsi yang materi pengkajiannya sama yaitu “penerimaan pajak” . Untuk lebih memahami bagaimana dan membuktikan tidak percontekan dalam membuat skripsi, pada dasarnya proses pembuatannya sama . Perbedaannya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak .

1. Penulis yang bernama lengkap Wutuh kristianto ini kuliah di UII , dalam penulisan yang berjudul “Analisa fakto-faktor yang mempengaruhi pajak hotel dan restoran “. Berfokus pada sesuatu yang istimewa yaitu, pendapatan dari pariwisata.. Daerah penelitiannya berada pada kabupaten Wonosobo, dengan tempat wisata Dieng. Faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran adalah PDRB nominal perkapita kabupaten Wonosobo , PDRB nominal perkapita luar jateng, dan pengeluaran pembangunan pemerintah. Otonomi daerah sebagai faktor pendorong dalam usaha memberdayakan masyarakat , menumbuhkan prakasa, dan kreatifitas dalam UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dengan otonomi daerah.. Dalam menganalisa hubungan antar variable independent dengan variable dependen pada penelitian ini penggunaan model regresi linier berganda adalah tepat, yang terbukti hipotesanya adalah pada variable X1 (PDRB nominal perkapita kab. Wonosobo) dan variable X2 (PDRB nominal perkapita luar jateng). Hipotesa yang tidak

terbukti adalah variable X3 (pengeluaran pemerintah). Tidak ditemukan adanya penyimpangan uji asumsi klasik .

2. Penulis yang bernama Yanuar ikhsan , mahasiswa UNSOED. Judul skripsi “Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran ‘ . Daerah penelitian di Kabupaten Purwokerto, dengan tempat wisata Baturaden dan tempat istirahat orang-orang yang melakukan perjalanan antar kota (Jakarta-surabaya, jakarta- semarang). Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel dan restoran adalah: PDRB perkapita kabupaten Purwokerto, PDRB perkapita luar jateng dan jumlah pelanggan hotel dan restoran. Semua faktor padadasarnya berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran. Pada kenyataannya atau dengan pengujian hipotesa terbukti tidak semua faktor terbukti berpengaruh positif . Untuk PDRB perkapita Kabupaten purwokerto tidak memberi pengaruh yang positif , karena masyarakat di sekitarnya belum sadar akan wajib pajak .Dalam pengujian asumsi klasik dalam penelitian terdapat kesalahan asumsi klasik , analisa regresi tidak lolos.

Setiap penulis dalam argumennya mempunyai sisi pandang yang berbeda-beda.

Dengan alat pengujian yang sama , hasil yang akan diperoleh tidak tentu sama.

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

4.1 Pajak Daerah

Pembangunan untuk negara yang sedang berkembang sangatlah penting, karena dengan pembangunan menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Pajak sebagai salah satu konsekuensi pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan yang pembiayaannya dari pungutan masyarakat dan dalam pemungutannya pemerintah tidak bisa bersifat diskriminatif dan harus adil, selain penerimaan pemerintah lainnya. Pada masa sekarang pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi masyarakat harus ikut campurtangan juga dalam proses, yang masuk dalam berbagai hal. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara bertahap akan semakin banyak dilimpahkan pada daerah.

Dengan semakin meningkatnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, peranan keuangan akan semakin penting, karena daerah tersebut akan dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasikan sumber dananya sendiri, disamping mengelola dana yang diterima dari pemerintah pusat secara efisien. Maka kepada daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, maka kepada daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk pembiayaan berbagai tugas dan tanggungjawabnya, yang terdiri dari hasil penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain usaha yang sah. Upaya peningkatan

PAD(pendapatan asli daerah) merupakan pencerminan dari usaha dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Pajak secara umum adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah akan memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar beban tersebut memberikan beban yang adil. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum/pemerintah. Yang pada dasarnya pajak mengandung unsur paksaan dalam pengenaannya. Paksaan tersebut terlihat dalam bentuk kewajiban dari si wajib pajak untuk membayar kepada pemerintah dengan tidak berdasarkan suatu prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak . Sedangkan yang dimaksud tidak mendapatkan prestasi langsung dari

pemerintah ialah bahwa pembayaran pajak tidak mendapat imbalan tertentu yang erat hubungannya dengan pembayaran yang dilakukan. Prestasi negara seperti hak untuk menggunakan jalan-jalan umum dan sebagainya, tapi bukan wajib pajak pun dapat menikmati.

Dasar Hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.

4.1.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah.

Dalam literature pajak dan *publik finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, wewenang, sifat dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutnya. Artinya, pihak yang berwenang dan berhak memungut pajak daerah adalah pemerintah daerah. Klasifikasi pajak menurut wilayah pemungutannya dibagi menjadi :

4.1.1.1 Pajak Propinsi

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat propinsi. Pajak propinsi yang berlaku saat ini :

- 1). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengamilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

4.1.1.2 Pajak Kabupaten/kota

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota yang berlaku saat ini ;

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C

Apabila pada kenyataannya potensi pajak yang ada tidak mempunyai potensi yang seharusnya maka bisa tidak dikenai pungutan pajaknya.

4.2 Peraturan Daerah tentang Pajak

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan Daerah sebelum ditetapkan terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat, ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaannya ditetapkan oleh kepala daerah yang mengatur ketentuan mengenai:

- a) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
- b) tata cara penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa;
- c) asas timbal balik.

Peraturan Daerah tentang pajak sekurang-kurangnya mengenai ;

- 1) nama, objek, dan subjek pajak
- 2) dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;

- 3) wilayah pemungutan;
- 4) penetapan;
- 5) tata cara pembayaran dan penagihan ;
- 6) kadaluwarsa
- 7) sanksi administrasi; dan
- 8) tanggal mulai berlakunya.

Dalam hal peraturan daerah apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah dapat membatalkan (paling lama 1 bulan) Peraturan pemerintah yang dimaksud.

4.3 Tata Cara Pemungutan pajak

Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak ,penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya. Dalam perpajakan keadilan haruslah obyektif dan dapat dirasakan merata oleh rakyat. Landasan berpikir yang mendasari pemungutan pajak adalah azas pemungutan pajak yaitu: *Equality, Certainty, convenience, Economy*. Teori pemungutan pajak ada guna memberi dasar menyatakan keadilan (*justification*) kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.

4.3.1 Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

- 1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan nya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak , yakin setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata kebaikannya adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan , maka wajib pajak harus menambah dan sebaliknya.

4.3.2 Asas Pemungutan pajak

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri.

4.3.3 Sistem pemungutan pajak

4.3.3.1 *Official Assessment System* (Sistem pemungutan pemerintah)

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.

4.3.3.2 *Self Assessment System* (Sistem pemungutan sendiri)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ,
- 3) Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

4.3.3.3 *With Holding System*(Sistem pemungutan pihak ketiga)

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memerikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan ukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak .

Ciri-cirinya :wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan Waji Pajak.

4.3.4 Beberapa teori dasar pemungutan pajak:

4.3.4.1 Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini tidak ada pengganti bila masyarakat merugi dan besarnya pajak yang dibayar dengan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

4.3.4.2 Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. (*Benefit Approach*). Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

4.3.4.3 Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul yang berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang masing-masing (*Ability to Pay Approach Theory*). Untuk mengukur daya pikul seseorang dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4.3.4.4 Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa pemayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

4.3.4.5 Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

4.4 Identifikasi semua Variabel Penelitian:

4.4.1 .Penerimaan pajak penerangan jalan

Salah satu pendapatan pajak daerah adalah pajak penerangan jalan yang diperoleh dari persentase pembayaran rekening listrik yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan batasan dari pemerintah pusat . Pemungutan pajak penerangan dengan paksaan dalam arti kata setiap orang dalam membayarkan biaya beban listrik langsung dikenakan/ditambah dengan jumlah pajak penerangan jalan , walaupun hanya beberapa persen dari tagihan listrik tapi apabila terkumpul dari jumlah pelanggan maka akan terkumpul banyak .oleh karena itu pendapatan pajak penerangan jalan terbanyak dari pajak daerah lainnya, tetapi untuk rekening yang bersifat sosial seperti masjid rumah sakit dan lainnya tidak dikenakan persentase pajak penerangan jalan.

4.4.2 PDRB per Kapita (Sesuai dengan harga berlaku)

Pendapatan rata-rata tiap tahun yang disesuaikan dengan harga barang kebutuhan sehari-hari dan pendapatan rata-rata dari tiap individu yang berlaku pada tiap tahunnya . Dalam pembayaran rekening listrik pun demikian disesuaikan dengan pendapatan dan perekonomian di daerahnya , apabila kondisi perekonomiannya sedang baik dan pendapatan tiap individu baik maka penggunaan akan tenaga listrik tidak akan dihiraukan sebarangpun tidak jadi masalah . hanya saja tiap kapasitas sudah punya batasan sendiri , sehingga pembayarannya pun ada maksimalnya. Begitu juga apabila pendapatan dan kondisi perekonomian (krisis moneter) yang semuanya mahal tanpa dibarengi

dengan peningkatan pendapatan , sehingga pada penggunaan listrik pun akan mengurangi tenaga listriknya dengan penggunaan listrik pada hal-hal yang dianggap perlu dan wajib saja(perlu seperti untuk penerangan belajar dan wajib seperti penerangan jalan) .

Untuk PDRB per kapita dalam penghitungan pajak akan berpengaruh begitu juga dalam penghitungan pajak penerangan jalan , karena pembayaran pajak di sesuaikan dengan kondisi yang ada pada lingkungan daerahnya dan itu juga akan mempengaruhi banyak sedikitnya pelanggan listrik dan mampu tidaknya pelanggan untuk membayar tagihan listriknya. Sehingga PDRB per Kapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

4.4.3 Tarif biaya beban listrik

Tarif dikenakan disesuaikan dengan peraturan dari pusat , yang telah dihitung berdasarkan proses pengadaan akan listrik walaupun ada sedikit subsidi dari pemerintah yang sekarang mulai dikurangi dengan terlihatnya tarif yang makin meningkat . Dan tidak hanya karena itu karena pembangkit tenaga listrik berasal dari sumber daya alam (yang sudah jadi sifat manusia hanya bisa menggunakan tanpa bisa memelihara apalagi mengembalikan sumber daya alamnya) yang setiap harinya terus merosot yang tidak meningkat maka penggunaan tenaga listrik diharapkan untuk berhemat oleh pemerintah pusat sehingga kenaikan tarif merupakan salah satu jalan supaya berhemat. Dan ada lagi yang proses penghematan tenaga listrik dengan pemadaman berkala yang dilakukan oleh pihak PLN ,karena ketidaksadaran manusia akan keterbatasan energi listriknya.

Tarif biaya beban listrik berpengaruh positif karena penerimaan pajak penerangan jalan diperoleh dari persentase jumlah tarif biaya beban listrik .

4.4.4 Jumlah Pelanggan Listrik

Pertumbuhan penduduk tiap tahunnya selalu meningkat walaupun sudah ada alat kotrasepsi , tetap saja pertumbuhan penduduk selalu meningkat . Dibarengi juga dengan jumlah pelanggan yang terus bertambah ,walau terkadang ada yang terkena pemutusan listrik karena tidak sanggupnya para pelanggan membayar rekeningnya , pemutusan listrik di lakukan dalam jangka yang sudah ditentukan selama 3 bulan denda tidak terbayarkan . Dengan demikian , seperti kata pepatah “Mati satu tumbuh seribu” satu pemutusan, yang mendaftar/mengajukan pemasangan listrik mengantri sampai berbulan-bulan baru dapat terpasangkan listrik banyak , walaupun antrian banyak yang terdaftar tiap bulannya sebagai pelanggan terus meningkat.

Jumlah pelanggan listrik berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan, karena banyaknya tarif yang diperoleh tergantung pada jumlah pelanggan listrik berdasarkan banyak tidaknya pemakaian listrik yang digunakan .Belum tentu juga jumlah pelanggan listrik meningkat tapi penerimaan pajak belum tentu meningkat, karena banyak sedikitnya penerimaan pajak penerangan jalan disesuaikan dengan kondisi terutama pada perekonomian sehingga penggunaan listriknya disesuaikan juga dengan pendapatannya.

4.4.5 Panjang jalan

Panjang jalan Di kabupaten Kebumen dapat mempengaruhi, bertambah dan berkurangnya pendapatan akan pajak penerangan jalannya . Pada dasarnya pendapatan akan pajak penerangan jalan dipengaruhi pada berapa banyak energi, yang digunakan untuk menerangi seluruh Kabupaten Kebumen dengan demikian penerimaan pajak penerangan jalan akan diperoleh setelah pajak penerangan digunakan untuk membayar energi yang dipakai untuk penerangan jalan. Apabila penerimaan pajak penerangan jalan meningkat tapi, pembayaran untuk penerangan jalan tetap , maka ada peningkatan pendapatan untuk pemerintah bertambah. Pendapatan bertambah maka pemerintah akan lebih dapat, melakukan pembangunan untuk masyarakatnya. Panjang jalan akan berpengaruh negative pada penerimaan pajak penerangan jalan , karena panjang jalan akan membutuhkan tenaga listrik (penerangan jalan) dan, itu biaya yang harus dibayar oleh pemerintah . Pembayaran didapat dari masyarakat yang membayar biaya beban listriknya, sebesar 9% untuk daerah cabang Cilacap yang termasuk Kebumen.

4.5 kesimpulan yang diperoleh dari diskusi:

Dalam penerimaan pajak penerangan jalan sebagai variabel dependennya dan PDR per kapita, Tarif biaya beban listrik, Jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan, sebagai variabel Independen. Variabel Independen berpengaruh positif terhadap Variabel Dependen. Untuk panjang jalan berpengaruh negative terhadap variabel dependen. PDRB perkapita sebagai faktor perangsang dalam penggunaan listrik maksudnya, PDRB

perkapita dalam hal ini yang disesuaikan dengan harga yang berlaku yaitu penggunaan listriknya dilihat juga pada kebutuhan yang lainnya seperti dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya dan kebutuhan lainnya. Yang disesuaikan dengan harga yang berlaku pada saat ini dan pendapatan. Listrik hanya sebagai alat dalam menjalani hidup atau pemenuhan kebutuhan sehari-hari sehingga rangsangan dalam penggunaannya disesuaikan dengan badget yang ada.

Untuk Tarif biaya beban sebagai faktor yang menentukan seberapa banyak listrik yang bisa digunakan yang disesuaikan dengan pendapatan dan kebutuhan akan listriknya. Apabila tarif yang diputuskan oleh pemerintah pusat terlalu tinggi maka banyak para pelanggan listrik yang akan mengurangi penggunaannya apalagi dibarengi dengan harga bahan pokok harganya tinggi dan pendapatannya terlalu rendah untuk hidup, bisa juga para pelanggan listrik akan meninggalkan listrik dan berganti dengan lampu tempel atau sinar rembulan yang gratis.

Untuk jumlah pelanggan listrik sebagai faktor yang harus membayar dan pengguna listrik. Jumlah pelanggan listrik meningkat belum tentu penerimaan pajak penerangan jalan meningkat pula karena penggunaan listrik meningkat pada sisi VA dan Kwhnya, walaupun jumlah pelanggan meningkat tapi Kwhnya tetap maka penerimaan pajak penerangan jalannya pun tetap. Kesimpulannya Penerimaan pajak penerangan jalan tinggi apabila PDRB perkapita turun, Tarif listrik tinggi dan Jumlah pelanggan (KWh) tinggi. dan Penerimaan pajak penerangan jalan turun apabila PDRB perkapita naik, Tarif biaya beban listrik turun dan jumlah pelanggan turun.

Panjang jalan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan , karena panjang jalan membutuhkan biaya untuk menerangi jalan .Biaya yang harus dikeluarkan berasal dari 9% tariff biaya beban listrik yang dibayarkan oleh masyarakat. Tiap ruas jalan diperlukan penerangan , terkadang tanpa izin dari pemerintah masyarakatpun membuat penerangan jalan sendiri.Tiap tahunnya banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah , untuk penerangan jalan terus meningkat.

4.6 Hipotesa penelitian

Hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara simultan pengaruh yang signifikan dari variable-variabel independent.

Secara parsial hipotesa yang diajukan adalah:

1. PDRB riil perkapita Kabupaten kebumen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen.
2. Tarif biaya beban listrik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen.
3. Jumlah pelanggan listrik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen.
4. Panging jalan berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1 Daerah Penelitian

Tempat atau daerah penelitian tentang pajak penerangan jalan (pajak daerah), yaitu Kabupaten Dati II Kebumen. Alasan daerah tersebut sebagai daerah penelitian, Kabupaten Kebumen penerimaan terbesar dari pajak daerah adalah pajak penerangan jalan, walaupun masih ada daerah yang belum menikmati listrik. Sehingga penerimaan pajak penerangan jalan masih bisa meningkat yang masih bisa ditingkatkan lagi, karena potensi dalam perindustrian masih terus berjalan pembangunannya.

5.1.1 Sumber Pengumpulan Data

Data Sekunder, yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan, serta teori-teori, ataupun laporan penelitian yang berada di BPS Kab. Kebumen dan perpustakaan. Dan semua hal yang dapat mendukung perihal tujuan penelitian.

5.2 Analisa data

Adapun metode analisa yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif yaitu analisa data yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan matematik atau statistika yang sifatnya pasti. Pada saat ini yang sesuai dengan data menggunakan olahan secara time series (TSP) yaitu dengan metode analisa regresi kuadrant terkecil (OLS) dan dengan penyetaraan kesalahan asumsi klasik.

Untuk dapat mencapai tujuan penelitian dan untuk membuktikan besar tidaknya hipotesa penelitian serta untuk menganalisa hubungan antar variabel-variabel dalam persamaan model pajak penerangan jalan, disamping berdasarkan teori ekonomi dan keadaan maka digunakan alat analisa statistik dan ekonometri. Untuk dapat lebih mempermudah penelitian terutama dalam pengolahan data dan mendekatkan tingkat kenyataan, maka data ini diolah melalui program TSP (Time Series Processor), yaitu dengan model analisa regresi kuadrat terkecil (OLS). Analisa ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel dependen dan independen yang ada dalam model. Adapun fungsi pajak penerangan jalan yang akan diteliti diformulasikan sebagai berikut :

$$PPj = f(PDRB, Tbb, Jpl, Pj)$$

Keterangan :

PPj = Penerimaan pajak penerangan jalan (milyar)

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (milyar)

Tbb = Tarif biaya beban (rupiah)

Jpl = Jumlah pelanggan listrik(orang)

Pj = Panjang jalan(km)

Dengan pendefinisian dan peranannya dalam penelitian ini :

1. PDRB per kapita kabupaten kebumen .

Untuk penelitian ini PDRB per kapitanya yang dipakai adalah PDRB perkapita berdasarkan harga yang berlaku bagaimanapun juga penggunaan dan permintaan akan listrik sangat dipengaruhi dengan kondisi perekonomian

saat ini, apalagi untuk pedesaan perubahan harga sedikitpun besar pengaruhnya terhadap pola kehidupannya. Dan juga pendapatan tiap masyarakat juga akan mempengaruhi permintaan akan penggunaan listrik. Peranan PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

2. Tarif biaya beban listrik.

Tarif digunakan untuk melihat banyaknya pendapatan yang diperoleh dari penggunaan listrik dan penerimaan pajak yang diterima 10 % dari pembayaran penggunaan listrik yang setiap tahunnya belum tentu meningkat. Peranan akan tarif biaya beban listrik berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

3. Jumlah pelanggan listrik

Banyaknya pelanggan listrik di kabupaten kebumen rata-rata terbanyak adalah penggunaan listrik di desa, sehingga dapat mewakili penggunaan listrik yang ada di berbagai sektor (rumah tangga, industri, usaha, sosial, kantor pemerintahan dan penerangan jalan) untuk meneliti seberapa besar penerimaan pajaknya untuk kabupaten. Peranan akan jumlah pelanggan listrik berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

4. Panjang jalan.

Panjang jalan digunakan untuk melihat seberapa banyak penggunaan akan lampu penerangan jalan. Setiap 1km terdapat 2 lampu penerangan jalan, atau disesuaikan dengan tiap kebutuhan. Tarif biaya

penerangan jalan dibayar oleh pemerintah, yang diambil dari penerimaan pajak penerangan jalan. Panjang jalan akan berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

Secara umum bentuk persamaan adalah sebagai berikut (Damodar Gujarati, 1979) :

Persamaan bentuk regresi linier :

$$PP_j = \beta_0 + \beta_1 PDRB + \beta_2 Tbb + \beta_3 Jpl + \beta_4 + \varepsilon$$

Dimana $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ adalah merupakan koefisien elastisitas. Dengan ketentuan β adalah konstanta, $\beta_0, \dots, \beta_4$ adalah koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi Pajak penerangan jalan. ε adalah faktor gangguan atau kesalahan, yang menjelaskan besarnya pengaruh masing-masing variabel dan mengetahui variabel apa yang paling berpengaruh menggunakan koefisien elastisitasnya langsung dapat diketahui, yakni parameter $\beta_1, \dots, \beta_4$.

Uji -t

Uji-t adalah untuk menguji hubungan regresi secara terpisah atau parsial dari variabel-variabel bebas secara terpisah terhadap variabel terikat, untuk melihat pengaruh masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat. Penghitungan uji-t ini adalah sebagai berikut :

Pengujian t-test (one-tail) : $t\text{-tabel} = t(df)$

$$t\text{-hitung} = \frac{b1 - \beta}{SE(\beta1)} \quad \text{atau} \quad t\text{-hitung} = \frac{b1}{SE.b1}$$

Dimana : $\beta1$ = penaksiran koefisien $b1$

$SE(\beta1)$ = standar kesalahan yang ditaksir (deviasi $b1$)

β = selang keyakinan

i = 1,2,3,...tingkat keyakinan

df = derajat kebebasan

Dengan tingkat keyakinan (level of significant) tertentu, $df = n - k$.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk uji ini adalah sebagai berikut :

$H_0 : \beta_0 = 0$, ini berarti tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau diluar selang keyakinan .

$H_a : \beta_0 \neq 0$, ini berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat atau berada didalam selang keyakinan.

Dengan perbandingan yang diperoleh dari perhitungan nilai-t didapat ketentuan :

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka hipotesis H_0 diterima dan hipotesis H_a ditolak.

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka hipotesis H_0 ditolak dan hipotesis H_a diterima.

Hipotesa nol (H_0) adalah hipotesa yang menyatakan tidak ada peranan dari variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan hipotesa alternatif (H_a)

merupakan hipotesa yang menyatakan adanya peranan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Uji-F

Uji ini merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji-F ini juga dimaksudkan untuk melihat pengaruh seluruh koefisien regresi variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun perhitungan uji-F (F-test) adalah sebagai berikut :

$$F\text{-Hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

n = jumlah observasi

k = jumlah variabel

R^2 = Estimasi

Jika F-hitung telah diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai f-tabel dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, maka hipotesa H_0 diterima dan hipotesa H_a ditolak

Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, maka hipotesa H_0 ditolak dan hipotesa H_a diterima.

Hipotesa nol (H_0) adalah hipotesa yang menyatakan tidak adanya peranan variabel bebas dengan variabel terikat, sedangkan

hipotesa alternatif (H_a), merupakan hipotesa yang menyatakan adanya peranan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Pengujian Pelanggaran Asumsi Klasik

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas pada hasil estimasi. Karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut, uji-t dan uji-F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh. Adapun yang dimaksud dengan autokorelasi, multikolinieritas dan heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

1) Autokorelasi

Salah satu asumsi dalam model regresi linier adalah tidak terjadinya autokorelasi pada kesalahan pengganggu (error term). Jadi, bila asumsi ini tidak dipenuhi maka estimator yang diperoleh tidak lagi efisien karena selang keyakinan makin melebar, sehingga uji-t dan uji-F menjadi tidak valid. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan uji Durbin Watson (uji-DW). Rumus pengujian uji-DW adalah sebagai berikut (Damodar Gujarati, 1978, 120);

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=N} (e_t - e_{(t-1)})^2}{\sum_{t=1}^{t=N} e_t^2}$$

dimana:

e_t = residual terhadap waktu

t = waktu

Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0 : \rho = 0$

$H_a : \rho \neq 0$

Nilai kritis dari d_l dan d_u dapat diperoleh dari tabel statistik uji-DW yang tergantung pada banyaknya observasi n dan besarnya variabel penjelas.

♦ Jika hipotesis H_0 tidak ada korelasi positif maka :

$d_{hitung} < d_l$, H_0 ditolak

$d_{hitung} > d_l$, H_0 diterima

$d_l \leq d_{hitung} \leq d_u$, pengujian tidak meyakinkan

♦ Jika hipotesis H_0 tidak ada korelasi negatif maka :

$d_{hitung} < 4 d_l$, H_0 ditolak

$d_{hitung} > 4 d_u$, H_0 diterima

$4 d_u \leq d_{hitung} \leq 4 d_l$, pengujian tidak meyakinkan

♦ Jika H_0 adalah dua ujung yaitu tidak ada serial autokorelasi baik positif atau negatif maka :

$d_{hitung} < d_l$, H_0 ditolak

$d_{hitung} > 4 d_l$, H_0 ditolak

$d_u < d_{hitung} < 4$, H_0 diterima

$d_l \leq d_{hitung} \leq 4 d_u$, pengujian tidak meyakinkan

$4 d_l \leq d_{hitung} \leq d_l$, pengujian tidak meyakinkan

Konsekuensi yang akan terjadi apabila ada autokorelasi didalam suatu model adalah :

(a) Bahkan jika kita mengabaikan korelasi serial dalam penaksiran OLS(Kuadrat terkecil bias) yang dihitung secara konvensional dan variansnya, penaksiran tadi masih tetap tidak efisien (kalau dibandingkan dengan BLUE(Penaksir kolinear terbaik)). Oleh karena itu selang keyakinannya menjadi lebar secara tidak perlu dan pengujian artinya (signifikan) kurang akurat.

(b) Meskipun penaksiran OLS tidak bias, yang merupakan sifat penyampelan ulang, dalam suatu sampel tertentu, penaksiran tadi nampaknya memberikan gambaran yang menyimpang dari nilai populasi sebenarnya. Dengan kata lain, penaksiran OLS menjadi sensitif terhadap fluktuasi penyampelan.

2. Heteroskedastisitas

Suatu asumsi yang penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (disturbance) yang muncul dalam fungsi regresi populasi adalah heteroskedastisitas yaitu apakah semua gangguan mempunyai varians yang

sama atau tidak. Jika terjadi heteroskedastisitas berarti varians gangguan berbeda dari satu observasi ke observasi lainnya.

Pengujian ini dilakukan melalui uji metode Park dan diperoleh uji partial (uji-T) dengan melalui perhitungan terhadap nilai residual terhadap masing-masing variabel independen. Dengan kriteria seperti uji-T maka akan diketahui terdapat tidaknya masalah heteroskedastisitas pada regresi.

Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan ini berarti tidak terdapat masalah dalam heteroskedastisitas.

Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_0 ditolak berarti terdapat adanya masalah heteroskedastisitas.

3. Multikolinearitas

Multikolinearitas yaitu situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat hubungan korelasi antar variabel independen, dimana multiklinieritas terjadi jika terdapat hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen.

Dalam uji ini akan dibandingkan nilai koefisien R^2 dan nilai r^2 hasil uji matriks korelasi dengan metode Klein. Dimana jika nilai $r^2 < R^2$ maka dapat disimpulkan tidak adanya multikolinieritas.

BAB VI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, dilakukan analisis terhadap data kuantitatif yang telah diperoleh dari tahun 1985 sampai tahun 2003. Alat analisis yang digunakan sesuai dengan uji MWD (uji MacKinnon, White, dan Davidson) dalam penelitian ini adalah fungsi model empiris log-linier dengan variabel dependen penerimaan pajak penerangan jalan dan variabel independen berupa PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan, dengan menggunakan rumus :

$$PPJ = \beta_0 PDRB^{\beta_1} Tbb^{\beta_2} Jpl^{\beta_3} Pj^{\beta_4}$$

$$PPJ = a + bLnPDRB + bLnTbb + bLnJpl + bLnPj + e$$

Keterangan :

PPJ : Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (Rupiah)

A : Konstanta

b : Koefisien Regresi

e : *error*

PDRB : PDRB per kapita (Rupiah)

Tbb : Tarif Biaya Beban (Rupiah)

Jpl : Jumlah Pelanggan Listrik (Pelanggan)

Pj : Panjang Jalan (km)

Berdasarkan pada data yang diperoleh, kemudian dilakukan perhitungan atau pengolahan data dengan menggunakan program *MicroTSP*

7.0. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6.1
Hasil Uji Regresi Berganda
Pengaruh PDRB per kapita, Tarip Biaya Beban, Jumlah Pelanggan Listrik,
Panjang Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

LS // Dependent Variable is LPPJ Date: 4-05-2006 / Time: 21:31 SMPL range: 1985 - 2003 Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-355.49538	85.804146	-4.1431026	0.0010
LPDRB	0.1738487	0.1371017	1.2680274	0.2255
LTBB	3.6613255	3.1320853	1.1689737	0.2619
LJPL	0.0677158	0.1422413	0.4760628	0.6414
LPJ	57.542403	13.865920	4.1499161	0.0010
R-squared	0.969223	Mean of dependent var		20.51537
Adjusted R-squared	0.960429	S.D. of dependent var		0.897336
S.E. of regression	0.178502	Sum of squared resid		0.446082
Log likelihood	8.681230	F-statistic		110.2197
Durbin-Watson stat	1.379465	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan *MICRO TSP 7.0*.

Untuk mengetahui adanya kesesuaian tanda parameter estimasi dengan teori yang menerangkan, hasil estimasi fungsi di atas perlu diuji dengan uji statistik dan uji asumsi klasik.

6.1 Uji statistik

6.1.1 Uji t

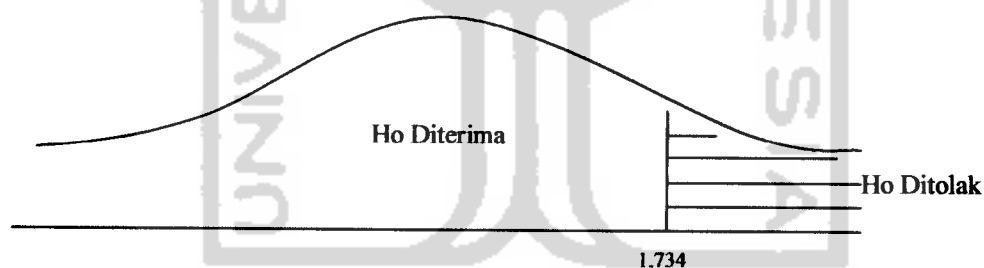
Merupakan pengujian variabel penjelas secara individu yang dilakukan untuk melihat apakah variabel independen berupa PDRB per kapita,

tarip biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen berupa Penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis :

- $H_0 : \alpha_i \leq 0$, artinya independen variabel tidak memiliki hubungan signifikan positif terhadap dependen variabel.
- $H_a : \alpha_i > 0$, artinya independen variabel memiliki hubungan signifikan positif terhadap dependen variabel.

T tabel : $\alpha = 95\%$ dan $n-1; 19 - 1 = 18$

Sehingga besarnya t_{tabel} adalah 1,734



Dengan membandingkan antara t_{tabel} dengan t_{hitung} tersebut di atas maka dapat dijelaskan bahwa:

- PDRB/ kapita memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,268 atau $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ sebesar 1,734 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulannya, secara individual PDRB/ kapita tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

- Tarip biaya beban memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,168 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar 1,734 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulannya, secara individual tarip biaya beban tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.
- Jumlah pelanggan listrik memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,476 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ sebesar 1,734 sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak. Kesimpulannya, secara individual jumlah pelanggan listrik tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.
- Panjang jalan memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,149 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar 1,734 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulannya, secara individual panjang jalan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

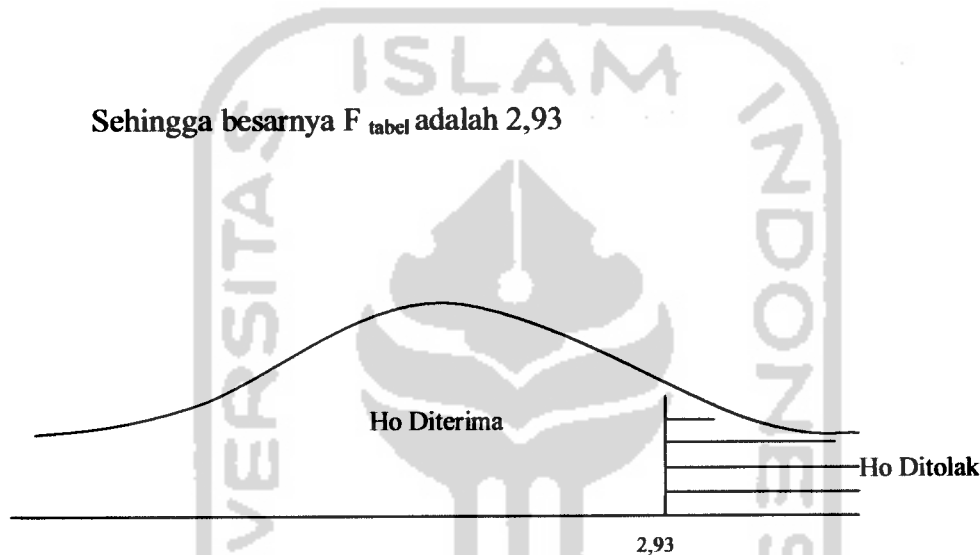
6.1.2 Uji F (uji keseluruhan koefisien regresi)

Merupakan pengujian variabel-variabel investasi, jumlah penduduk dan pendapatan perkapita secara keseluruhan dan serentak. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen berupa PDRB per kapita, tarip biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen berupa penerimaan pajak penerangan jalan. Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah :

- $H_0 : \alpha_i \leq 0$, artinya independen variabel tidak memiliki hubungan signifikan positif terhadap dependen variabel.
- $H_a : \alpha_i > 0$, artinya independen variabel memiliki hubungan signifikan positif terhadap dependen variabel.

F_{tabel} : $\alpha = 95\%$ dan $n-1; 19 - 1 = 18$

Sehingga besarnya F_{tabel} adalah 2,93



Dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} di atas maka dapat dijelaskan bahwa nilai F_{hitung} diketahui sebesar 110,219 dengan F_{tabel} sebesar 2,93, sehingga dikatakan bahwa nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen berupa penerimaan pajak penerangan jalan.

Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) menjelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel

independen berupa PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara bersama-sama terhadap variabel dependen berupa penerimaan pajak penerangan jalan adalah signifikan.

6.1.3 Koefisien R^2 (koefisien determinasi)

Koefisien R^2 atau disebut sebagai koefisien determinasi digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi dari variabel penerimaan pajak penerangan jalan dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan.

Dari hasil pengujian diketahui nilai R^2 sebesar 0,969, artinya variabel PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara bersama-sama dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 96,9%, sedangkan sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh faktor-faktor selain variabel PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh yang cukup dominan terhadap besarnya penerimaan pajak penerangan jalan.

6.2 Asumsi Klasik

6.2.1 Autokorelasi

Adalah adanya korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksiran tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar. Salah satu cara menguji autokorelasi adalah dengan percobaan *(Durbin Watson)*.

Dalam penelitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan menguji korelasi di antara masing-masing data dalam satu variabel independen dengan menggunakan *Durbin Watson*. Suatu kelompok data dikatakan bebas dari autokorelasi jika nilai *Durbin Watson* hasil pengujian berada di antara batas atas atau *upper bound* (du) dan $4-du$. Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* hasil pengujian sebesar 1,379. Karena nilai du diketahui sebesar 1,87 dan nilai $4-du = 4-1,87$ sebesar 2,13, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai *Durbin Watson* hasil pengujian berada di bawah du dan $4-du$. Oleh sebab itu disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif.

6.2.2 Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan dalam fungsi regresi mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksiran OLS tidak efisien baik dalam sampel besar maupun sampel kecil (tapi masih tetap tidak bias dan konsisten). Salah satu cara mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan *Spearman Correlation*, sebagai berikut:

Tabel 6.2
 Hasil Uji Heterokedastisitas
 PDRB per kapita, Tarip Biaya Beban, Jumlah Pelanggan Listrik
 dan Panjang Jalan

LS // Dependent Variable is LU2				
Date: 4-06-2006 / Time: 21:47				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	1939.8458	1272.9646	1.5238805	0.1498
LPDRB	0.0856398	2.0339990	0.0421041	0.9670
LTBB	27.858066	46.466678	0.5995278	0.5584
LJPL	1.0988857	2.1102489	0.5207375	0.6107
LPJ	-313.89187	205.71062	-1.5258905	0.1493
R-squared				
		0.192096	Mean of dependent var	-5.392547
Adjusted R-squared		-0.038734	S.D. of dependent var	2.598360
S.E. of regression		2.648205	Sum of squared resid	98.18183
Log likelihood		-42.56246	F-statistic	0.832197
Durbin-Watson stat		2.673418	Prob(F-statistic)	0.526745

Sumber : hasil data dari *Micro TSP 7.0*.

Pengujian heterokedastisitas di atas dilakukan dengan pengujian Park. Park menyarankan suatu bentuk fungsi spesifik di antara σ^2_i dan variable bebas untuk menyelidiki ada-tidaknya masalah heterokedastisitas. Berdasarkan table 6.2 terlihat bahwa koefisien LPJ signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian menurut uji Park empiris yang digunakan $LPPJ_t = f(LPDRB_t, LTBB_t, LJPL_t, LPJ_t)$ lolos dari masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, model tersebut tidak terkena heteroskedastisitas

6.2.3 Multikolinieritas

Ada hubungan antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Salah satu kaidah yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu model empiris yaitu menggunakan korelasi parsial (*examination of partial correlation*). Metode ini muncul berkaitan dengan kelemahan dari derajat nol yang disarankan oleh *Farrar* dan *Glauber*(1967). Dengan nilai $R^2_{LPPJ,LPDRB,LTBB,LJPL,LPJ} = 0,969$ lebih besar dibandingkan dengan nilai R^2 dalam regresi parsial : $R^2_{LPDRB,LTBB,LJPL,LPJ}=0,877, R^2_{LTBB,LPDRB,LJPL,LPJ}=0,949, R^2_{LJPL,LPDRB,LTBB,L$
 $PJ = 0,866$ dan $R^2_{LPJ,LPDRB,LTBB,LJPL} = 0,881$ maka mengikuti kaidah selayang pandang dari metode ini dapat disimpulkan bahwa dalam model empiris $LPPJ_t = f(LPDRB_t, LTBB_t, LJPL_t, LPJ_t)$ tidak ditemukan adanya multikolinieritas.. Dari hasil pengujian di atas diketahui bahwa nilai korelasi antara variabel PDRB per kapita tarip biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan berkisar dibawah 0,969. Oleh karena nilai korelasi di antara variabel tersebut $\leq 0,969$ maka dapat disimpulkan bahwa di antara variabel independen tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

a. Koefisien Regresi

Dari hasil pengujian regresi non linier berganda yang telah dilakukan diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$PPJ = -335,495 + 0,174 \text{ PDRB} + 3,661 \text{ TBB} + 0,067 \text{ JPL} + 57,542 \text{ PJ}$$

Nilai konstanta sebesar -355.495.380 menjelaskan bahwa apabila PDRB per kapita, Tarif biaya beban, Jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan tetap maka Penerimaan pajak penerangan jalan Turun sebesar -355,495/juta rupiah

Koefisien regresi untuk variabel panjang jalan diketahui sebesar +57,542. Hal ini menjelaskan bahwa variabel panjang jalan bisa menjelaskan pengaruhnya terhadap perubahan nilai penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kebumen sebesar 57,542 dengan arah koefisien (+). Artinya kenaikan yang terjadi pada variabel panjang jalan sebesar 1% akan memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 57.542%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kenaikan panjang jalan akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan nilai penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kebumen.

b. Interpretasi Ekonomi

Dari hasil pengujian regresi non-linear berganda yang dilakukan untuk menguji pengaruh variabel PDRB per kapita tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan terhadap penerimaan pajak

penerangan jalan, diperoleh kesimpulan bahwa secara bersama-sama keempat variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kebumen. Akan tetapi secara individual, hanya variabel panjang jalan yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Nilai koefisien determinasi menegaskan bahwa variabel panjang jalan dapat menjelaskan besarnya pengaruh yang ditimbulkan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kebumen secara signifikan. Adapun penjelasan dari pengaruh variabel panjang jalan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Kebumen dapat diuraikan sebagai berikut:

Panjang jalan memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Semakin panjang jalan akan meningkatkan pertambahan prosentase pajak penerangan jalan. Sehingga panjang jalan memberikan penerimaan pajak penerangan jalan lebih meningkat dengan menaikkan prosentase pajak penerangan jalan. Seperti halnya yang terdapat pada peraturan pemerintah daerah no.4 Th. 1998 Tgl. 16-03-1998. sehingga panjang jalan memberikan penerimaan pajak penerangan jalan lebih meningkat dengan menaikkan prosentase pajak penerangan jalan. Penerimaan pajak penerangan jalan yang diterima oleh pemerintah adalah berasal dari pembayaran penggunaan listrik (rekening tagihan listrik) dan beberapa persentasenya diberikan kepada pemerintah dari PLN. Tiap berapa persennya yang harus diberikan kepada pemerintah

ditentukan dalam peraturan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen no.4 Thn.1998.Salah satu factor yang mempengaruhi ketentuan persentase pajak adalah panjang jalan yang akan diterangi listrik. Sehingga panjang jalan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pajak penerangan jalan.

Secara teori PDRB perkapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak penerangan jalan . Setelah melihat pada kenyataannya PDRB perkapita tidak berpengaruh , karena walaupun PDRB naik tapi penggunaan akan tenaga listrik tetap karena masyarakat kebumen khususnya didaerah pedesaan lebih bisa berhemat dengan penggunaan listrik seperlunya saja. Seperti halnya pada saat malam hari lampu yang digunakan adalah pada penerangan depan dan kamar tidur , ruang tamu dinyalakan pada saat ada tamu saja , penggunaan lampu hemat energi dari PLN sangat diminati masyarakat dan dibelakang lembar rekening terdapat tata cara untuk berhemat energi listrik. Melihat pada hasil analisisnya (kenyataannya) PDRB perkapita tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

Naik turunnya tarif biaya beban listrik tidak berpengaruh terhadap penggunaan energi listrik, untuk pedesaan penggunaan listrik sebatas pada penerangan saja jarang usaha yang menggunakan tenaga listrik. Tariff biaya beban tidak berpengaruh karena berapapun tarif yang ditentukan dari PLN maka masyarakat akan berusaha mengeluarkan biaya seperti rutinitas tiap bulannya. Apabila tariff biaya beban naik maka masyarakat akan lebih

menekan penggunaan akan energi listriknya dengan hemat energi listriknya. Sehingga tarif biaya beban listrik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

Namun demikian, dalam penelitian ini variabel jumlah pelanggan listrik tidak mampu menunjukkan pengaruhnya yang signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Hal ini bisa saja terjadi manakala pertumbuhan jumlah pelanggan ternyata tidak diikuti oleh peningkatan konsumsi listrik secara signifikan. Hal ini menjadikan banyaknya pelanggan listrik yang relatif minim dalam pemakaian listrik. Demikian juga halnya dalam kasus pajak penerangan jalan. Peningkatan jumlah pelanggan listrik tidak selalu akan melahirkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajaknya dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya. Seperti halnya kesadaran untuk membayar listrik karena PLN harus membayarkan persentase pajak penerangan jalannya. Sehingga Jumlah Pelanggan listrik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel independen berupa PDRB per kapita, tarif biaya beban dan jumlah pelanggan listrik secara bersama-sama berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen berupa penerimaan pajak penerangan jalan.
2. Variabel independen berupa panjang jalan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penerangan jalan.
3. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) menjelaskan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen berupa PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara bersama-sama terhadap variabel dependen berupa penerimaan pajak penerangan jalan adalah signifikan.
4. Dari hasil pengujian diketahui nilai *R square* sebesar 0,969, artinya variabel PDRB per kapita, tarif biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara bersama-sama dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 96,9%, sedangkan sisanya sebesar 3,1% dijelaskan oleh faktor-faktor selain variabel

PDRB per kapita, tarip biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan.

5. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB per kapita, tarip biaya beban, jumlah pelanggan listrik dan panjang jalan secara bersama-sama memiliki kontribusi pengaruh yang cukup dominan terhadap besarnya penerimaan pajak penerangan jalan.

7.2. Saran

Dari kesimpulan penelitian di atas maka dapat disajikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan PDRB per kapita masyarakat setempat, melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah minimum regional/ propinsi serta upaya konstruktif lainnya. Sebab kombinasi dari peningkatan jumlah PDRB per kapita berpotensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak penerangan jalan.
2. Pengembangan serta peningkatan kualitas sarana, prasarana serta infrastruktur dapat menarik minat masyarakat untuk menetap di suatu daerah tertentu. Selanjutnya masyarakat yang tinggal tersebut akan dapat menjalankan aktivitas sosial ekonominya di wilayah daerah tersebut dan dapat memberikan kontribusi penting bagi pembangunan daerah melalui pembayaran pajak.

Lampiran 1

Data Penelitian

obs	PPJ	PDRB	TBB	JPL	PJ
1985	224.071	237975.3	4.550925	11428.00	584.0450
1986	288.512	263170.7	4.548706	16205.00	584.4980
1987	372.626	298447.5	4.548706	22080.00	584.9750
1988	333.000	361053.7	4.548706	27143.00	585.1540
1989	449.220	405498.2	4.708899	30471.00	585.5320
1990	531.721	473106.8	4.709260	35100.00	585.9760
1991	541.285	542034.4	4.698843	35328.00	586.4360
1992	509.054	595874.3	4.857950	38249.00	586.7680
1993	555.707	632761.1	4.857950	52087.00	587.1000
1994	427.175	791680.8	4.857950	51746.00	587.7650
1995	648.358	925329.0	4.934474	76446.00	587.9900
1996	906.189	1029537.	4.948760	89750.00	587.9870
1997	792.906	111412.0	4.700480	102250.0	594.2000
1998	1.628.641	1487455.	5.087596	126886.0	595.9000
1999	2.209.332	1587106.	5.153292	114729.0	596.1500
2000	2.453.192	1844612.	5.204007	128341.0	596.7500
2001	2.755.958	2036665.	5.204007	135425.0	596.4000
2002	3.409.614	2275050.	5.398163	142761.0	596.9970
2003	4.032.174	2561729.	5.537334	168422.0	598.2000



Lampiran 1

DATA ASLI DARI BPS

Tahun	PDRB per kapita	Jml Pign List	Tarif	Panjang	Kwh	%
	Hrg Konstan	Pedesaan	Rp/KWH	Jalan		
1985	216,480.42	11,428	94.72	584,045	48.046.083	7.5%
1986	223,855.85	16,205	94.51	584,498	48.129.361	7.5%
1987	238,920.27	22,080	94.51	584,975	48.129.361	7.5%
1988	253,162.68	27,143	94.51	585,154	48.129.361	6.0%
1989	287,096.11	30,471	110.93	585,532	42.449.283	7.0%
1990	281,058.23	35,100	110.97	585,976	42.437.235	7.0%
1991	286,212.77	35,328	109.82	586,436	42.786.769	7.0%
1992	298,796.30	38,249	128.76	586,768	37.806.383	8.0%
1993	301,245.27	52,087	128.76	587,100	37.806.383	7.0%
1994	329,653.97	51,746	128.76	587,765	37.806.383	7.0%
1995	344,257.01	76,446	139	587,990	35.499.812	7.0%
1996	808,126.29	89,750	141	587,987	35.097.730	8.0%
1997	824,238.27	102,250	110	594,200	427.316.363	8.0%
1998	712,753.83	126,886	162	595,900	314.049.135	9.0%
1999	734,667.00	114,729	173	596,150	297.878.015	9.0%
2000	799,030.00	128,341	182	596,750	297.362.492	9.0%
2001	781,480.43	135,425	182	596,400	244.260.762	9.0%
2002	800,105.28	142,761	221	596,997	245.663.233	9.0%
2003	842,222.28	314	254	598,200	176.385.599	9.0%

Lampiran 2

Hasil uji MWD (Mackinnon, White dan Davidson)

LS // Dependent Variable is LPPJ				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:14				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-231.18647	153.54759	-1.5056340	0.1561
LPDRB	0.3603162	0.2351349	1.5323807	0.1494
LTBB	3.5819300	3.1382475	1.1413791	0.2743
LJPL	0.1252298	0.1541572	0.8123511	0.4312
LPJ	37.588552	24.699332	1.5218449	0.1520
Z1	-1.2532185	1.2827860	-0.9769505	0.3464
R-squared	0.971328	Mean of dependent var	20.51537	
Adjusted R-squared	0.960300	S.D. of dependent var	0.897336	
S.E. of regression	0.178793	Sum of squared resid	0.415572	
Log likelihood	9.354284	F-statistic	88.07965	
Durbin-Watson stat	1.551442	Prob(F-statistic)	0.000000	

LS // Dependent Variable is LPPJ				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:16				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-221.41019	130.75916	-1.6932672	0.1142
LPDRB	0.2647576	0.1498749	1.7665233	0.1008
LTBB	4.1687476	3.0723978	1.3568385	0.1979
LJPL	0.2008543	0.1707329	1.1764242	0.2605
LPJ	35.985030	21.066762	1.7081424	0.1114
Z2	0.0001188	8.912E-05	1.3327250	0.2055
R-squared	0.972922	Mean of dependent var	20.51537	
Adjusted R-squared	0.962508	S.D. of dependent var	0.897336	
S.E. of regression	0.173751	Sum of squared resid	0.392461	
Log likelihood	9.897851	F-statistic	93.41943	
Durbin-Watson stat	1.517080	Prob(F-statistic)	0.000000	

Lampiran 3

Hasil Uji Regresi Berganda

LS // Dependent Variable is LPPJ				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:05				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-355.49538	85.804146	-4.1431026	0.0010
LPDRB	0.1738487	0.1371017	1.2680274	0.2255
LTBB	3.6613255	3.1320853	1.1689737	0.2619
LJPL	0.0677158	0.1422413	0.4760628	0.6414
LPJ	57.542403	13.865920	4.1499161	0.0010
R-squared	0.969223	Mean of dependent var	20.51537	
Adjusted R-squared	0.960429	S.D. of dependent var	0.897336	
S.E. of regression	0.178502	Sum of squared resid	0.446082	
Log likelihood	8.681230	F-statistic	110.2197	
Durbin-Watson stat	1.379465	Prob(F-statistic)	0.000000	

Coefficient Covariance Matrix			
C,C	7362.351	C,LPDRB	-4.799166
C,LTBB	137.8362	C,LJPL	6.594029
C,LPJ	-1189.446	LPDRB,LPDRB	0.018797
LPDRB,LTBB	-0.365293	LPDRB,LJPL	0.000872
LPDRB,LPJ	0.801942	LTBB,LTBB	9.809959
LTBB,LJPL	-0.120657	LTBB,LPJ	-23.06724
LJPL,LJPL	0.020233	LJPL,LPJ	-1.040067
LPJ,LPJ	192.2637		

Residual Plot	obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
*	1985	-0.15405	19.2275	19.3815
*	1986	0.01127	19.4768	19.4655
*	1987	0.17813	19.7334	19.5553
*	1988	0.00371	19.6237	19.6199
*	1989	0.11141	19.9233	19.8119
*	1990	0.19907	20.0912	19.8921
*	1991	0.15614	20.1094	19.9533
*	1992	-0.08106	20.0485	20.1296
*	1993	-0.05847	20.1350	20.1935
*	1994	-0.42444	19.8727	20.2971
*	1995	-0.13999	20.2900	20.4299
*	1996	0.15512	20.6248	20.4696
*	1997	-0.01834	20.4900	20.5083
*	1998	-0.22274	21.2049	21.4276
*	1999	0.01279	21.5160	21.5032
*	2000	-0.00997	21.6207	21.6306
*	2001	0.11930	21.7370	21.6177
*	2002	0.11764	21.9499	21.8322
*	2003	0.04447	22.1176	22.0731

Lampiran 4

**Hasil uji regresi untuk mendeteksi masalah
multikolinieritas dan Autokorelasi**

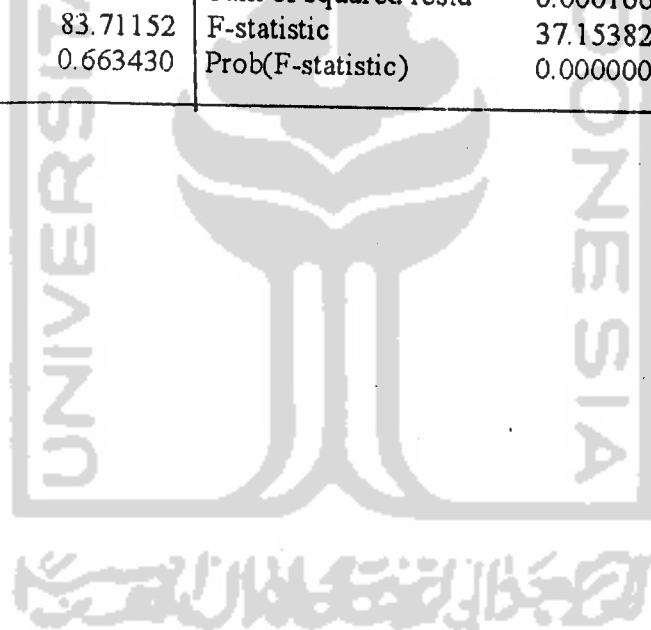
LS // Dependent Variable is LPPJ				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:28				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-355.49538	85.804146	-4.1431026	0.0010
LPDRB	0.1738487	0.1371017	1.2680274	0.2255
LTBB	3.6613255	3.1320853	1.1689737	0.2619
LJPL	0.0677158	0.1422413	0.4760628	0.6414
LPJ	57.542403	13.865920	4.1499161	0.0010
R-squared	0.969223	Mean of dependent var	20.51537	
Adjusted R-squared	0.960429	S.D. of dependent var	0.897336	
S.E. of regression	0.178502	Sum of squared resid	0.446082	
Log likelihood	8.681230	F-statistic	110.2197	
Durbin-Watson stat	1.379465	Prob(F-statistic)	0.000000	

LS // Dependent Variable is LPDRB				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:21				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	255.31737	147.53369	1.7305700	0.1040
LTBB	19.433732	3.1007897	6.2673491	0.0000
LJPL	-0.0463853	0.2676103	-0.1733314	0.8647
LPJ	-42.663604	23.676032	-1.8019744	0.0917
R-squared	0.877598	Mean of dependent var	13.45926	
Adjusted R-squared	0.853118	S.D. of dependent var	0.877143	
S.E. of regression	0.336167	Sum of squared resid	1.695125	
Log likelihood	-4.001346	F-statistic	35.84901	
Durbin-Watson stat	1.919240	Prob(F-statistic)	0.000000	

LS // Dependent Variable is LTBB				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:22				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-14.050635	6.0722174	-2.3139217	0.0353
LPDRB	0.0372370	0.0059414	6.2673491	0.0000
LJPL	0.0122994	0.0112877	1.0896313	0.2931
LPJ	2.3514109	0.9684936	2.4279054	0.0282
R-squared	0.949653	Mean of dependent var	1.587049	
Adjusted R-squared	0.939584	S.D. of dependent var	0.059867	
S.E. of regression	0.014715	Sum of squared resid	0.003248	
Log likelihood	55.44456	F-statistic	94.31117	
Durbin-Watson stat	1.271748	Prob(F-statistic)	0.000000	

LS // Dependent Variable is JPL				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:23				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	-23560066.	4043748.2	-5.8262940	0.0000
LPDRB	-5761.8741	7670.7296	-0.7511507	0.4642
LTBB	384418.85	168857.57	2.2765864	0.0379
LPJ	3620930.1	659813.13	5.4878116	0.0001
R-squared	0.966820	Mean of dependent var	73939.32	
Adjusted R-squared	0.960184	S.D. of dependent var	50100.58	
S.E. of regression	9997.053	Sum of squared resid	1.50E+09	
Log likelihood	-199.7050	F-statistic	145.6929	
Durbin-Watson stat	1.320000	Prob(F-statistic)	0.000000	

LS // Dependent Variable is LPJ				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:24				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	6.1865338	0.0363148	170.35850	0.0000
LPDRB	-0.0041711	0.0023147	-1.8019744	0.0917
LTBB	0.1199771	0.0494159	2.4279054	0.0282
LJPL	0.0054096	0.0022505	2.4037463	0.0296
R-squared	0.881387	Mean of dependent var		6.379981
Adjusted R-squared	0.857664	S.D. of dependent var		0.008810
S.E. of regression	0.003324	Sum of squared resid		0.000166
Log likelihood	83.71152	F-statistic		37.15382
Durbin-Watson stat	0.663430	Prob(F-statistic)		0.000000



Lampiran 5

Hasil uji Park
Untuk mendeteksi Masalah Heterikedastisitas

LS // Dependent Variable is LU2				
Date: 5-13-2006 / Time: 19:36				
SMPL range: 1985 - 2003				
Number of observations: 19				
VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT.	2-TAIL SIG.
C	1939.8458	1272.9646	1.5238805	0.1498
LPDRE	0.0856398	2.0339990	0.0421041	0.9670
LTBB	27.858066	46.466678	0.5995278	0.5584
LJPL	1.0988857	2.1102489	0.5207375	0.6107
LPJ	-313.89187	205.71062	-1.5258905	0.1493
R-squared	0.192096	Mean of dependent var	-5.392547	
Adjusted R-squared	-0.038734	S.D. of dependent var	2.598360	
S.E. of regression	2.648205	Sum of squared resid	98.18183	
Log likelihood	-42.56246	F-statistic	0.832197	
Durbin-Watson stat	2.673418	Prob(F-statistic)	0.526745	

Coefficient Covariance Matrix			
C,C	1620439.	C,LPDRB	-1056.287
C,LTBB	30337.46	C,LJPL	1451.332
C,LPJ	-261794.7	LPDRB,LPDRB	4.137152
LPDRB,LTBB	-80.40030	LPDRB,LJPL	0.191903
LPDRB,LPJ	176.5058	LTBB,LTBB	2159.152
LTBB,LJPL	-26.55631	LTBB,LPJ	-5077.054
LJPL,LJPL	4.453150	LJPL,LPJ	-228.9166
LPJ,LPJ	42316.86		

Residual Plot	obs	RESIDUAL	ACTUAL	FITTED
	1985	2.35539	-3.74091	-6.09631
*	1986	-3.00993	-8.97079	-5.96086
	1987	2.41577	-3.45047	-5.86624
*	1988	-5.47440	-11.1934	-5.71901
	1989	0.43156	-4.38902	-4.82058
	1990	1.65946	-3.22820	-4.88766
	1991	1.46300	-3.71395	-5.17696
*	1992	-0.69371	-5.02525	-4.33153
*	1993	-1.51396	-5.67853	-4.16457
	1994	2.79395	-1.71398	-4.50793
*	1995	-0.18188	-3.93240	-3.75052
*	1996	-0.24426	-3.72715	-3.48289
	1997	0.26579	-7.99761	-8.26340
	1998	3.49276	-3.00347	-6.49624
*	1999	-2.34313	-8.71878	-6.37565
*	2000	-2.93383	-9.21624	-6.28241
	2001	1.77854	-4.25225	-6.03079
	2002	0.97663	-4.28030	-5.25693
*	2003	-1.23775	-6.22568	-4.98793

Lampiran 6

Table 11.4.2
Table

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1993
Menurut Kabupaten/Kotamadya di Jawa Tengah Tahun 1993 - 1997
Gross Regional Domestic Product per Capita at Constant 1993 Market Price
by Regency/Municipality in Jawa Tengah 1993 - 1997

Kabupaten/Kotamadya Regency/Municipality	1993 ¹⁾	1994 ¹⁾	1995 ¹⁾	1996 ¹⁾	1997 ²⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Kab. Cilacap	3 276 789,50	3 333 041,55	3 325 482,07	3 404 264,46	3 232 032,13
02. Kab. Banyumas	619 614,05	639 236,18	691 309,87	714 082,95	752 255,61
03. Kab. Purbalingga	637 175,47	675 130,05	734 480,43	777 464,82	764 778,83
04. Kab. Banjarnegara	881 378,70	941 024,58	997 964,95	1 057 029,35	1 046 246,41
05. Kab. Kebumen	686 896,53	721 508,37	761 041,19	808 126,28	823 750,78
06. Kab. Purworejo	762 167,11	804 095,28	858 607,88	915 751,77	985 659,57
07. Kab. Wonosobo	612 609,67	618 347,15	732 356,40	801 457,90	713 054,48
08. Kab. Magelang	843 684,94	878 867,22	919 433,36	967 609,53	971 551,43
09. Kab. Boyolali	880 688,13	938 400,48	994 611,98	1 052 612,94	1 075 939,33
10. Kab. Klaten	866 478,81	913 951,90	972 613,60	1 033 040,87	1 055 812,64
11. Kab. Sukoharjo	1 145 541,51	1 229 008,38	1 357 170,53	1 550 682,09	1 626 171,31
12. Kab. Wonogiri	607 412,59	619 689,82	639 091,36	704 847,38	718 228,34
13. Kab. Karanganyar	1 344 808,70	1 424 745,34	1 502 350,58	1 600 415,14	1 673 399,53
14. Kab. Sragen	671 473,97	717 207,62	754 394,35	817 209,31	826 753,39
15. Kab. Grobogan	587 806,44	599 317,89	612 377,91	624 869,57	603 723,68
16. Kab. Blora	811 447,61	825 900,48	858 922,41	871 959,24	886 114,63
17. Kab. Rembang	854 420,00	870 872,18	907 361,22	922 425,78	946 383,11
18. Kab. Pati	774 430,90	799 861,51	826 757,77	816 190,58	849 789,70
19. Kab. Kudus	4 228 450,92	4 660 483,38	4 983 539,92	5 285 822,53	4 941 917,83
20. Kab. Jepara	888 590,15	944 917,90	1 009 580,72	1 062 847,57	1 089 993,05
21. Kab. Demak	729 737,09	761 500,81	815 170,06	849 874,43	877 756,95
22. Kab. Semarang	857 031,87	914 015,74	995 857,70	1 154 995,76	1 198 451,05
23. Kab. Temanggung	935 141,39	963 315,35	1 014 998,46	1 122 870,85	1 087 913,97
24. Kab. Kendal	1 615 589,04	1 704 613,49	1 798 658,87	1 860 455,45	1 936 741,17
25. Kab. Batang	1 025 132,83	1 065 010,38	1 126 763,32	1 192 690,87	1 215 713,10
26. Kab. Pekalongan	970 755,70	1 027 888,80	1 087 433,30	1 149 435,48	1 216 020,67
27. Kab. Pemalang	728 584,30	772 249,56	814 402,91	854 531,45	862 035,09
28. Kab. Tegal	590 573,58	619 167,94	649 851,24	680 756,20	704 354,01
29. Kab. Brebes	632 420,65	669 519,30	708 844,10	750 720,97	787 369,78
30. Kod. Magelang	2 211 106,20	2 267 687,05	2 430 630,05	2 646 011,45	2 737 941,37
31. Kod. Surakarta	1 879 849,06	2 005 970,11	2 359 247,47	2 571 908,39	2 726 132,61
32. Kod. Salatiga	1 845 049,16	1 413 047,53	1 527 137,80	1 634 170,20	1 699 033,77
33. Kod. Semarang	3 258 414,20	3 523 800,46	3 849 998,01	4 241 092,75	4 140 524,77
34. Kod. Pekalongan	1 326 795,84	1 422 276,46	1 527 835,94	1 728 624,09	1 792 401,75
35. Kod. Tegal	1 245 579,71	1 314 972,34	1 345 090,39	1 444 138,64	1 529 636,70

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah
Source : BPS-Statistical Bureau of Jawa Tengah Province

Lampiran 7

Tabel 6.3.3
Table

Penjualan Tenaga Listrik Menurut
Fungsi Penggunaannya di Jawa Tengah Tahun 1998
*Selling of Electricity Power by Expenditure Function
in Jawa Tengah 1998*

Pemakaian <i>Kind of Utility</i>	Pelanggan <i>Consumer</i>	Daya Tersambung (VA)	K W H Jual	Harga (Rp/Kwh)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Rumah Tangga <i>Household</i>	3 985 797	2 067 806 620	2 960 475 357	162
02. Usaha <i>Business</i>	104 136	329 662 271	432 720 490	329
03. Industri <i>Industry</i>	3 943	801 778 785	2 544 252 816	181
04. Kantor <i>Office</i>	11 826	53 054 574	71 986 341	302
05. Penerangan Jalan <i>Road Lighting</i>	5 738	24 312 878	116 851 156	234
06. Sosial <i>Social</i>	102 927	116 916 300	160 682 053	170
Jumlah/Total	1998	4 214 467	3 393 531 428	6 286 968 213
	1997	3 941 673	3 329 601 298	6 021 196 718
	1996	3 497 493	2 935 901 733	5 253 573 111
	1995	3 093 571	2 553 652 480	4 646 058 699
	1994	2 635 707	2 208 246 918	4 052 083 558

Sumber : PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah
Source : PT. PLN (Persero), Jawa Tengah

Lampiran 8

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
(SKPD)

PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMDA

- ☐ KAB. CILACAP
☐ KAB. KEBUMEN
☐ KAB. BANYUMAS
☐ KAB. WONOSOBO

BULAN: MAR-2004

NAMA: M SAFARI

ALAMAT: DS LINGARAN 0 0 0 KUTO WNG

NO. PELANGGAN:

51-504-072199-8

PAJAK PENERANGAN JALAN

% X Rp.

40.035

Rp.

3.605

TERBILANG

//TIGA RIBU ENAM RATUS
S LIMA RUPIAH//

PERDA KAB. KEBUMEN
NO. 4 TH. 1998 TGL.
16-03-1998

KASI PENETAPAN

04 - 00553808



PT. PLN (PERSERO)

AREA PELAYANAN PELANGGAN
CILACAP

25/03/2004 08:57

REKENING LISTRIK

KODE PP	KODE KEL	PERIODE PEMBAYARAN
HC	C	12 S/D 25-03-2004
TEMPAT PEMBAYARAN		

SUDAH TERIMA DARI
NAMA: M SAFARI
ALAMAT: DS LINGARAN 0 0 0 KUTO WNG
GARDU TIANG: JDOL20KEMO1
UANG
SEJUMLAH: //EMPAT PULUH RIBU TIGA PULUH LIMA RUPIAH//

GUNA PEMBAYARAN REKENING LISTRIK

BL - TH	NOMOR	KODE KEDUDUKAN	KODE GOL.
MAR-2004	405618	JDA-KCET-135-00	0

TARIP / DAYA	TARIP BIAYA PEMAKAIAN	TARIP BIAYA BEBAN
	kWh	kVarh
ELM 450 VA	254,00 420,00	23.500

ANGKA KEDUDUKAN METER		FAKTOR	PEMAKAIAN kWh
AKHIR	LALU		
LUBF	6855	1	3050

PERINCIAN REKENING LISTRIK	
RP. BEBAN	10.575
RP. BLK-1	7.620
RP. BLK-2	21.840
JUMLAH:	40.035

BEA METERAI LUNAS SESUAI KEPUTUSAN
NO.

S.38/WFJ.23/KP.0207/2004
TOTAL TAGIHAN RP. 43.640

MANAJER

W. S. S.

TUL III-03

Lampiran 9

Tabel 16.3.2

Tabel

Penjualan Tenaga Listrik (Desa dan Kelurahan)
Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003
Selling of Electricity Power by Regency/City
in Jawa Tengah 2003

Kabupaten/Kota Regency/City	Pelanggan Consumer	Daya Tersambung (VA)	Energi Jual (KWH)
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Kab. Cilacap	206 089	226 016 626	522 873 789
02. Kab. Banyumas	221 070	174 472 637	278 600 251
03. Kab. Purbalingga	99 149	70 681 076	112 206 105
04. Kab. Banjarnegara	87 656	60 754 888	99 203 930
05. Kab. Kebumen	168 422	104 777 080	176 385 599
06. Kab. Purworejo	135 673	86 829 190	124 837 093
07. Kab. Wonosobo	86 658	60 051 727	100 455 953
08. Kab. Magelang	107 693	70 521 235	114 719 728
09. Kab. Boyolali	84 650	75 551 890	169 278 920
10. Kab. Klaten	248 485	171 370 125	245 555 535
11. Kab. Sukoharjo	141 409	138 061 145	301 954 078
12. Kab. Wonogiri	183 625	107 800 765	130 071 565
13. Kab. Karanganyar	107 863	148 842 044	439 651 057
14. Kab. Sragen	220 835	150 134 008	244 178 436
15. Kab. Grobogan	226 118	146 378 041	199 293 581
16. Kab. Blora	132 599	84 597 866	102 458 369
17. Kab. Rembang	78 334	50 508 865	70 291 021
18. Kab. Pati	197 116	135 434 325	220 142 396
19. Kab. Kudus	168 211	162 774 813	247 543 058
20. Kab. Jepara	139 729	116 231 680	194 409 771
21. Kab. Demak	96 941	74 649 058	121 627 196
22. Kab. Semarang	105 286	148 950 640	389 867 486
23. Kab. Temanggung	120 634	79 854 983	126 425 193
24. Kab. Kendal	162 763	212 153 074	500 056 909
25. Kab. Batang	78 614	65 746 790	132 172 908
26. Kab. Pekalongan	102 031	89 370 851	182 015 492
27. Kab. Peralang	154 041	102 749 940	162 093 866
28. Kab. Tegal	122 908	84 222 780	141 448 626
29. Kab. Brebes	196 145	124 009 393	226 952 588
30. Kota Magelang	101 605	96 768 846	182 397 919
31. Kota Surakarta	168 020	280 247 381	574 517 411
32. Kota Salatiga	100 240	94 998 060	194 802 884
33. Kota Semarang	303 738	714 428 312	1 365 617 975
34. Kota Pekalongan	46 872	59 581 739	119 512 601
35. Kota Tegal	111 295	98 649 150	163 555 049
Jumlah/Total	2003	5 012 517	4 668 171 023
	2002	4 828 535	4 520 492 157
	2001	4 658 765	4 280 674 151
	2000	4 518 982	3 976 162 510
	1999	4 362 981	3 641 956 553

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah

Source: PT PLN (Persero), Jawa Tengah

Lampiran 10

Tabel : 7.1.

PANJANG JALAN DI KABUPATEN KEBUMEN DIRINCI MENURUT
JENIS PERMUKAAN, KONDISI JALAN DAN KELAS JALAN
TAHUN 1996

K E A D A A N	Tahun 1995 (Km)	Tahun 1996 (Km)
(1)	(2)	(3)
I. JENIS PERMUKAAN		
a. Diaspal	451,10	495,450
b. Kerikil	55,89	21,430
c. Tanah	81,00	71,107
d. Tidak dirinci	-	-
J U M L A H	587,99	587,987
II. KONDISI JALAN		
a. Baik	393,34	399,078
b. Sedang	78,90	114,515
c. Rusak	70,07	36,615
d. Rusak Berat	45,68	38,779
J U M L A H	587,99	587,987
III. KELAS JALAN		
a. Kelas I	-	-
b. Kelas II	31,00	31,000
c. Kelas III	137,85	137,850
d. Kelas III A	282,25	326,600
e. Kelas IV	55,89	21,430
f. Kelas V	81,00	71,107
g. Tidak Dirinci/Tanah	-	-
J U M L A H	587,99 ✓	587,987

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen

Tabel : 6.5.
Table

**BANYAKNYA PELANGGAN LISTRIK PLN DAN JUMLAH KWH YANG DIPAKAI
DIRINCI MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2002**
*Number of Consumers PT. PLN (Persero) and Selling of Electricity Power by Sub District
in Kebumen 2002*

<u>Kecamatan/ Sub Districts</u>	<u>Banyaknya Pelanggan</u>	<u>Jumlah KWH</u>
(1)	(2)	(3)
01 Ayah	3.874	4.534.861
02 Buayan	3.399	3.978.832
03 Puring	5.426	1.011.244
04 Petanahan	6.100	1.136.858
05 Klirong	6.679	1.244.766
06 Buluspesantren	6.508	1.212.897
07 Ambal	5.177	964.838
08 Mirit	6.129	1.142.262
09 Bonorowo	*)	*)
10 Prembun	4.289	799.341
11 Padureso	*)	*)
12 Kutowinangun	5.688	1.060.073
13 Alian	5.979	1.114.307
14 Poncowarno	*)	*)
15 Kebumen	20.035	3.733.925
16 Pejagoan	5.782	1.077.592
17 Sruweng	7.449	1.388.271
18 Adimulyo	5.922	4.256.135
19 Kuwarasan	6.898	8.074.722
20 Rowokele	4.437	5.193.903
21 Sempor	3.390	3.968.296
22 Gombong	11.301	13.228.825
23 Karanganyar	7.275	8.516.034
24 Karanggayam	3.865	4.524.326
25 Sadang	3.943	734.857
26 Karangsambung	*)	*)
Jumlah / Total	139.545	72.897.164
Jumlah Tahun 2001	139.239	89.280.834
Jumlah Tahun 2000	127.835	91.715.942

Ket : *) = Data masih tergabung dengan kecamatan induk

Sumber Data : Kantor PLN Ranting Gombong dan Kebumen
Source : PT. PLN (Persero) Kebumen dan Gombong

Tabel : 8.1.3.
TablLANJUTAN
(Continued)

Uraian Detail	Realisasi Realization (Rp.)	Persentase Percentage (%)
(1)	(2)	(3)
3. PEMBIAYAAN FINANCIAL	(6.872.611.174,00)	
3. 1. Pembiayaan Penerimaan <i>Financial Income</i>	27.037.125.939,00	100,00
3. 1. 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	26.957.125.939,00	99,70
3. 1. 2. Penerimaan Piutang	80.000.000,00	0,30
3. 2. Pembiayaan Pengeluaran <i>Financial Expenditure</i>	33.909.737.113,00	100,00
3. 2. 1. Transfer ke Dana Cadangan		0,00
3. 2. 2. Penyertaan Modal	525.000.000,00	1,55
3. 2. 3. Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	84.011.542,00	0,25
3. 2. 4. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berjalan	33.300.725.571,00	98,20

Sumber : Setda Kab. Kebumen

Source : Regional Secretariat of Kebumen Regency

Tabel : 8.1.4.
TablSUMBER-SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2004

Source of Origin Regional Income of Kebumen Regency year 2004

Jenis Penerimaan Kind of Incomes	Pendapatan Incomes	
	Besarnya Value (Jutaan Rp.)	Persentase Percentage (%)
(1)	(2)	(3)
A. PAJAK DAERAH <i>Regional Taxes</i>	7.324,49	27,89
1. Hotel dan Restoran	181,14	0,69
2. Hiburan	26,54	0,10
3. Reklame	56,83	0,22
4. Penerangan Jalan	6.858,75	26,11
5. Galian Golongan C	201,23	0,77
B. RETRIBUSI DAERAH <i>Regional Tolls</i>	11.601,81	44,17
1. Pelayanan Kesehatan	6.033,34	22,97
2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan	161,71	0,62
3. Biaya KTP + Akte Catatan Sipil	893,19	3,40
4. Cetak Kartu KK	188,52	0,72
5. Pemakaman dan Pengabuan Mayat	5,79	0,02
6. Parkir di tepi Jalan Umum	303,80	1,16
7. Pasar	1.345,06	5,12
8. Air Bersih	12,55	0,05
9. Pengujian Kendaraan	273,39	1,04
10. Pemakaian Kekayaan Daerah	263,30	1,02
11. Terminal	206,31	0,79
12. Rumah Potong Hewan	71,64	0,27
13. Tempat Rekreasi dan Olah Raga	943,08	3,59
14. Ijin Mendirikan Bangunan	202,39	0,77
15. Ijin Gangguan	150,89	0,57
16. Ijin Trayek	25,01	0,10
17. Ijin Usaha Jasa Konstruksi	14,30	0,05
18. Ijin Tebang dan Pengangkutan Kayu Rakyat	390,90	1,49
19. Inseminasi Buatan	68,80	0,26
20. Retribusi SIUP	28,58	0,11
21. Retribusi TOG	1,32	0,01
22. Retribusi WDP	12,34	0,05

bersambung ...
continued ...